

Skripsi

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG
DI TAMAN NASIONAL TAKA BONERATE KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR**

MASITA SUNARNI

Nomor Stambuk : 10561 046 3013



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG
DI TAMAN NASIONAL TAKA BONERATE**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memeperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun Dan Diajukan Oleh

MASITA SUNARNI

Nomor Stambuk : 10561 046 30 13

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Terumbu Karang Di Taman Nasional Taka Bonerate
Nama Mahasiswa : Masita sunarni
Nomor Stambuk : 10561 046 30 13
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 1113/FSP/A.I-VIII/VIII/38/2017, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017.



3. Drs. Alimuddin Said, M.pd

(.....)

4. Drs. Muhammad Tahir, M.Si

(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Masita Sunarni

Nomor Stambuk : 10561 046 30 13

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar,

2017

Yang Menyatakan,

Masita Sunarni

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi.Wabarakatuh.

Tiada untaian terindah yang paling pantas kita ucapkan, melainkan puji serta syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rezeki, rahmat serta karunianya yang tak terhingga, yang tak mampu penulis bahasakan. Karena atas petunjuk dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Terumbu Karang Di Taman Nasional Taka Bonerate.

Skripsi ini saya serahkan kepada almamater tercinta untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dalam Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga terkhusus kepada dosen pembimbing, Bapak Drs.Alimuddin Said,M.Pd selaku pembimbing I dan Bapak Drs.Muhammad Tahir, M.Si selaku pembimbing II, yang dengan tulus membimbing penulis, melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak dari awal sampai selesainya skripsi ini. Gagasan-gagasan beliau merupakan kenikmatan intelektual yang tak ternilai harganya. Teriring Doa semoga

Allah Tuhan Yang Maha Esa mengolongkan upaya-upaya beliau sebagai amal kebaikan.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis tak lupa mengucapkan Penghargaan dan Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya terutama kepada :

1. Bapak Dr. Abd Rahman Rahim SE, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Idris, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, dan juga sebagai penasehat Akademik yang telah banyak membantu penulis dalam konsultasi Akademik.
4. Semua Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Semua Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang selama ini telah memberi pelayanan administrasi.
6. Bapak Kepala Desa jinato Bapak Abdullah dan semua Informan yang telah memberikan informasi mengenai penelitian ini.
7. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2013 Khususnya Kelas A.

8. Teman-teman Kos Aspuri indah kak tia, nirma, kasma dan tanpa terkecuali
9. Untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis.
10. Secara khusus dari lubuk hati yang paling dalam perkenankanlah penulis menghanturkan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis yang tercinta Ayahanda Muhammad Nasir dan Ibunda Sitti Sulaeha dan saudara-saudara saya yang telah memberikan semangat, dukungan dan materi dalam menuntut ilmu, doanya yang tak pernah putus, semangat yang tak ternilai, semua ketulusan yang di berikan kepada ananda yang tak ada bandingannya. semoga ananda mampu membalas setiap tetesan keringat yang orang tua keluarkan demi membimbing ananda. serta saudara kawan-kawanku atas segala doa dan sumbangsinya.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar,

2017

Masita Sunarni

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian, konsep dan Teori.....	8
B. Kerangka Fikir.....	32
C. Fokus Penelitian.....	34
D. Deskripsi Fokus Penelitian.....	35
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan lokasi penelitian.....	37
B. Jenis dan tipe penelitian.....	37
C. Sumber data.....	38
D. Informan penelitian.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Pengabsahan Data.....	42

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi atau Karakteristik Objek Penelitian.....	45
B. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Terumbu Karang	53
C. Pemanfaatan Terumbu Karang	57
D. Kondisi Sumber Daya Manusia	60
E. Rehabilitasi Keadaan Terumbu Karang	62
F. Pengawasan Sumber Daya Terumbu Karang	64
G. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pengelolaan Terumbu Karang ..	67

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Taman Nasional Taka Bonerate terletak di Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Taka Bonerate. Taman Nasional Taka Bonerate merupakan taman wisata laut yang sekaligus sebagai tempat para nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan memanfaatkan sumber daya laut yang dimilikinya. Kekayaan sumber daya ikan strategis, seperti udang atau lobster, tuna atau cakalang, cumi-cumi, ikan demersal dan karang serta bola-bola (teripang) yang melimpah, telah menarik banyak armada penangkapan ikan dari luar kawasan, untuk beroperasi di wilayah ini. Namun demikian, kenyataan di lapangan saat ini, kondisi Sumber Daya Ikan di Taman Nasional Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar cenderung menunjukkan gejala penangkapan yang berlebihan yang dapat merusak kelestarian Terumbu Karang.

Sumber daya kelautan dan ekosistemnya merupakan sumberdaya potensial yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara berkesinambungan untuk kemakmuran rakyat dan dapat dinikmati dari generasi ke generasi secara berkelanjutan melalui manfaat barang maupun jasa apabila dikelola secara baik dengan memperhatikan karakteristik dan daya dukung lingkungannya. Pemanfaatan sumberdaya laut baik yang bersifat terbaharui maupun tidak terbaharui semakin meningkat seiring dengan meningkatnya populasi manusia, sehingga tekanan terhadap sumberdaya alam laut dan ekosistemnya semakin meningkat pula.

Kegiatan tersebut semakin dipicu oleh kegiatan yang tidak mengacu pada kriteria-kriteria pembangunan berwawasan lingkungan serta pemanfaatan sumberdaya alam laut yang berlebihan. Oleh karena itu pemanfaatan sumberdaya alam laut harus dilakukan secara bijaksana, terencana dan terkendali. Salah satu bentuk untuk melindungi sumberdaya alam ini adalah melakukan konservasi dengan cara menyisihkan lokasi-lokasi yang memiliki potensi keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, gejala alam dan keunikan, serta ekosistemnya menjadi kawasan konservasi laut. Melalui cara tersebut diharapkan upaya perlindungan secara lestari terhadap sistem penyangga kehidupan, pengawetan sumber plasma nutfah dan ekosistemnya serta pemanfaatan sumberdaya alam laut secara lestari dapat terwujud. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak terlepas dari pengelolaan terumbu karang yang lestari. Hal ini disebabkan karena terumbu karang merupakan bagian integral dari ekosistem pantai dan sebagai komponen dasar tempat berkembang biaknya biota-biota kecil (Mujiyanto:2013).

Terumbu Karang adalah bangunan ribuan karang yang menjadi tempat hidup berbagai ikan dan makhluk laut lainnya. Bayangkanlah terumbu karang sebagai sebuah kota yang sangat sibuk, bangunannya terdiri dari karang-karang, dengan ikan-ikan dan makhluk laut sebagai penghuninya. Karang yang hidup di laut, tampak terlihat seperti batuan atau tanaman. Tetapi mereka sebenarnya adalah sekumpulan hewan-hewan kecil yang dinamakan polip. Ada dua macam karang, yaitu karang batu (*hard corals*) dan karang lunak (*soft corals*). Karang batu merupakan karang pembentuk terumbu karena tubuhnya yang keras seperti batu. Kerangkanya terbuat dari kalsium karbonat atau zat kapur. Karang baru bekerja

sama dengan alga yang disebut zooxanthellae. Karang batu hanya hidup di perairan dangkal dimana sinar matahari masih didapatkan. Karang lunak bentuknya seperti tanaman dan tidak bekerja sama dengan alga. Karang lunak dapat hidup baik di perairan dangkal maupun di perairan dalam yang gelap. (Dari Wikipedia bahasa Indonesia)

Kekayaan terumbu karang Indonesia justru terancam rusak akibat berbagai hal, baik karena faktor alam seperti perubahan iklim maupun akibat ulah manusia sendiri salah satunya adalah penyebab kerusakan terumbu karang salah satunya adalah penangkapan ikan yang berlebih sedangkan masalah dalam pengelolaan terumbu karang yaitu infrastruktur yang tidak memadai, meningkatnya oknum-oknum yang merusak, *overfishing* (penangkapan sumber daya berlebih), pemutihan karang (coral bleaching) akibat pemanasan global dan sedimentasi pencemaran dari darat. Kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki bangsa Indonesia itu tidak dapat terpelihara, baik akibat perubahan iklim maupun masalah lokal seperti ketidaktahuan, bahkan keserakahan dalam mengeksploitasi kekayaan alam demi mendapat keuntungan tanpa memikirkan kelestarian alam. Kerusakan terumbu karang juga bernilai kerugian materiil yang sangat besar yang terkait nilai-nilai lain termasuk nilai-nilai ekologisnya. Hal inilah yang membuat perikanan terumbu karang merupakan salah satu sumber penghidupan utama bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil (King, 1995).

Kerusakan terjadi di beberapa pulau salah satunya yaitu pulau jinato yang juga terkenal akan tempat wisata dengan keunggulan Terumbu Karangnya dan sering diadakan acara-acara besar seperti lomba mancing yang sering diadakan

dan dihadiri oleh Bupati kepulauan selayar,dipulauau ini masi sering terjadi penangkapan ikan yang tidak wajar oleh sekelompok orang yang dapat merusak terumbu karang misalnya,menangkap ikan dengan menggunakan BOM dan BIUS inilah kasus yang sangat memprihatinkan dan menjadi keluhan bukan hanya untuk masyarakat disekitar pulau tersebut tapi juga bagi para penegak hukum dan para pengelola terumbu karang serta Nelayan yang mencari nafkah dengan menangkap ikan adapun yang menangkap ikan dengan cara menggunakan pukat harimau.

Berkurangnya terumbu karang menyebabkan pendapatan ekonomi masyarakat yang tinggal di Kawasan Taka Bonerate semakin menurun setiap tahunnya. Pemerintah banyak mengalami kendala dalam menuntaskan permasalahan kerusakan terumbu karang yang telah dipandang sebagai aktivitas mafia yang seolah tak pernah tersentuh hukum meskipun telah berkali-kali dilakukan upaya pemberantasan dan pengelolaan khususnya di Taman Nasional Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar (AM.Toni:2013).

Pengelolaan ekosistem terumbu karang pada hakekatnya adalah suatu proses pengontrolan tindakan manusia, agar pemanfaatan sumberdaya alam dapat dilakukan secara bijaksana dengan mengindahkan kaidah kelestarian lingkungan. Apabila dilihat permasalahan pemanfaatan sumberdaya ekosistem terumbu karang yang menyangkut berbagai sektor, maka pengelolaan sumberdaya terumbu karang tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, namun harus dilakukan secara terpadu oleh beberapainstansiterkait.Dasar pemikiran pengelolaan terumbu karang seharusnya yaitu terumbu karang merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang harus dikelola dengan bijaksana, terpadu dan berkelanjutan dengan memelihara daya

dukung dan kualitas lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat dan stakeholders (pengguna) guna memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat dan pengguna secara berkelanjutan (sustainable).

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka penulis tertarik mengkaji lebih lanjut tentang cara Pengelolaan Terumbu Karang di Taman Nasional Taka Bonerate dengan pertimbangan Undang -undang yang menjadi pertimbangan sehingga dibentuknya Perda Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Terumbu karang Yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816) dan masih banyak lagi undang-undang yang menjadi bahan pertimbangan dikeluarkannya peraturan daerah tersebut. dan akan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul : “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Terumbu Kranag Di Taman Nasional Taka Bonerate”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan terumbu karang di Taman Nasional Taka Bonerate Kepulauan Selayar?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dan pendukung implementasi kebijakan pengelolaan terumbu karang di Taman Nasional Taka Bonerate Kepulauan Selayar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan terumbu karang di Taman Nasional Taka Bonerate Kepulauan Selayar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan pengelolaan terumbu karang di Taman Nasional Taka Bonerate Kepulauan Selayar.

D. Manfaat Penelitian

Bila tujuan penelitian dapat dicapai maka hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis dan manfaat teoritis diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar dapat memanfaatkan sebagai referensi awal tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Terumbu Karang. Diharapkan kesadaran masyarakat dan hasil penelitian ini dapat memberi penjelasan dan memberi pengetahuan bagi penulis sesuai dengan masalah yang diteliti serta memberi motivasi untuk peneliti.

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama bagi ilmu Administrasi Negara khususnya dan lebih mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan terumbu karang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya bagi para nelayan sebagai tempat untuk mencari nafkah,dan tentunya penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Negara Republik Indonesia, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini dan berguna bagi pihak yang berminat pada masalah yang sama.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Konsep dan Teori

1. Konsep Kebijakan

Kebijakan Publik Lingkup dari studi kebijakan public sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Dalam pembahasan ini penelitian menyajikan teori-teori kebijakan public, pendekatan dalam studi kebijakan public hingga proses kebijakan public. Karena pada hakikatnya perda No 8 tahun 2010 tentang pengelolaan terumbu karang merupakan salah satu bentuk dari kebijakan public.

a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu ilmu multidisipliner karena melibatkan banyak disiplin ilmu seperti ilmu politik, sosial, ekonomi, dan psikologi. Studi kebijakan berkembang pada awal 1970-an terutama melalui tulisan Harold D. Laswell. Definisi dari kebijakan publik yang paling awal dikemukakan oleh Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam Howlett dan Ramesh (1995:2) yang mendefinisikan kebijakan publik/*public policy* sebagai “suatu program yang

diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu (a projected of goals, values, and practices)”.

Senada dengan definisi ini, George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Suwitri (2008: 10) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan”. Dari dua definisi di atas kita bisa melihat bahwa kebijakan publik memiliki kata kunci “tujuan”, “nilai-nilai”, dan “praktik”. Kebijakan publik selalu memiliki tujuan, seperti kebijakan pemerintah untuk menggantikan konsumsi minyak tanah dengan LPG adalah untuk menghemat subsidi negara. Praktik yang dilaksanakan adalah dengan mendistribusikan kompor gas dan tabung LPG 3 kg secara cuma-cuma kepada masyarakat.

Thomas R. Dye dalam Howlett dan Ramesh (2005:2), kebijakan publik adalah adalah “segala yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan perbedaan yang dihasilkannya (*what government did, why they do it, and what differences it makes*)”. Dalam pemahaman bahwa “keputusan” termasuk juga ketika pemerintah memutuskan untuk “tidak memutuskan” atau memutuskan untuk “tidak mengurus” suatu isu, maka pemahaman ini juga merujuk pada definisi Thomas R. Dye dalam Tilaar dan Nugroho (2008:185) yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan “segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah”.

Senada dengan definisi Dye, George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Suwitri (2008: 9) juga menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan : Apa

yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam policy statement yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah.

b. Tujuan Kebijakan Publik

Fungsi utama dari Negara adalah mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan kebijaksanaan bagi seluruh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tujuan-tujuan penting kebijakan pemerintah pada umumnya, yaitu.

- 1) Memelihara ketertiban umum (Negara sebagai stabilisator)
- 2) Memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal (Negara sebagai stimulator)
- 3) Memadukan berbagai aktivitas (Negara sebagai coordinator)
- 4) Menunjuk dan membagi benda material dan non material (Negara sebagai distributor).

c. Jenis Kebijakan Publik

Menurut James E. Anderson, kebijakan publik dapat di kelompokkan sebagai berikut :

1) *Substantive Policies and Procedural Policies.*

Substantive Policies adalah kebijakan yang dilihat dari substansi masalah yang di hadapi oleh pemerintah . Misalnya: kebijakan politik luar negeri, kebijakan di bidang pendidikan, kebijakan ekonomi, dan sebagainya. Dengan

demikian yang menjadi tekanan dari *substansi policies* adanya pokok masalahnya (*subject matter*) kebijakan. *Procedural Policies* adalah suatu kebijakan yang dilihat dari pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik, serta cara bagaimana suatu kebijakan publik diimplementasikan.

2) *Distributive, Redistributive, and self Regulatory policies.*

Distributive policies adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan atau keuntungan bagi individu-individu, kelompok-kelompok, perusahaan-perusahaan atau masyarakat tertentu. *Redistributive Policies* adalah kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, kepemilikan, atau hak-hak di antara kelas-kelas dan kelompok penduduk. *Self Regulatory policies* adalah kebijakan yang mengatur tentang pembatasan atau pelanggaran perbuatan atau tindakan bagi seseorang atau sekelompok orang.

3) *Material Policies*

Material Policies adalah kebijakan-kebijakan tentang pengalokasian atau penyediaan sumber –sumber material yang nyata bagi para penerimanya, atau mengenakan beban-beban bagi mereka yang mengalokasikan sumber-sumber material tersebut.

4) *Publik Goods and Private goods policies.*

Publik goods policies adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang dan pelayanan-pelayanan untuk kepentingan orang banyak. *Private goods policies* merupakan kebijakan-kebijakan tentang penyediaan

barang-barang atau pelayanan-pelayanan untuk kepentingan perorangan yang tersedia di pasar bebas, dengan imbalan biaya tertentu.

2. Pengertian Implementasi Kebijakan publik

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster, merumuskan bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertakan dengan sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian diadopsi dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai didalam konsep, muncul di lapangan. Selain itu, ancaman utama adalah konsistensi implementasi. Di bawah ini akan dijelaskan secara singkat beberapa teori implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan dapat dikatakan sebagai proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Berikut akan dijelaskan mengenai konsep implementasi yang dipaparkan oleh beberapa ahli diantaranya Budi Winarno (2002), mengatakan bahwa implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya.

Makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008:65), mengatakan bahwa : “implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan suatu fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata bagi masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Pandangan kedua ahli diatas dapat dikatakan bahwa suatu proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu program yang telah ditetapkan serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi segala pihak yang terlibat sekalipun dalam hal ini dampak yang diharapkan dan tidak diharapkan. Van Meter dan Van Horn (Budi Winarno, 2002; 102) membtasi implementasi kebijakan sebagai tidakan-tindakan yang dilakukan individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya, Micahel Howlet dan M. Ramesh (1995; 11) dalam buku Subarsono (2006; 13), bahwa *"implementasi kebijakan adalah proses untuk melakukan kebijakan supaya mencapai hasil."* Dari defenesi diatas dapat diketahui bahwa imlementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana suatu pelaksana kebijakan melakuakan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Kebrhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Meter dan Horn (subarsono; 2006; 99)

mengemukakan bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni;

- 1) Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan apabila standar dan sasaran kebijakan kabur,
- 2) Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
- 3) Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- 4) Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- 5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini public yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

- 6) Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

a. Teori-teori Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap selesai. Berikut disini ada sedikit info tentang pengertian implementasi menurut para ahli. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002), mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa "implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan". Pengertian

implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mclaughin (dalam Nurdin dan Usman, 2004). Adapun Schubert (dalam Nurdin dan Usman, 2002:70) mengemukakan bahwa "implementasi adalah sistem rekayasa." Subarsono (2008;89), mengemukakan beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

1. Teori George C. Edward

Dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu :

- 1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Sumberdaya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif.
- 2) Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya financial.
- 3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III (1980;98) menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya

berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.

- 4) Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan (Edward III, 1980;125) Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure (SOP)* dan fragmentasi.

2. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Teori ini berpendapat bahwa terdapat tiga kelompok variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu Karakteristik masalah (*tractability of the problems*)

1. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan dimana di satu pihak terdapat beberapa masalah social yang secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air bersih bagi penduduk.
2. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Hal ini berarti bahwa suatu program akan relative mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya adalah homogen, karena tingkat pemahaman kelompok sasaran relative sama.

3. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, dimana sebuah program akan relative sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi dan sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar
4. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan dimana sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relative mudah diimplementasikan dibanding program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

Karakteristik kebijakan (*ability of statue to structure implementation*), yaitu :

- a) Kejelasan isi kebijakan, yaitu, karena semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan, maka akan lebih mudah di implementasikan, karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata.
- b) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis, di mana kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji, meskipun untuk beberapa lingkungan tertentu perlu ada modifikasi.
- c) Besarnya alokasi sumber daya financial terhadap kebijakan tersebut, di mana sumber daya keuangan adalah factor krusial untuk setiap program social, setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program yang semuanya memerlukan biaya,

- d) Seberapa besar adanya ketertarikan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana, di mana kegagalan kerja sering disebabkan oleh kurangnya koordinasi vertical dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program.
- e) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
- f) Tingkat komitmen aparat, terhadap tujuan kebijakan. Kasus korupsi yang terjadi di Negara-negara dunia ke tiga, khususnya Indonesia salah satu sebabnya adalah rendahnya tingkat komitmen aparat untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan atau program-program.
- g) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan, di mana suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akan relative mendapat dukungan di banding program yang tidak melibatkan masyarakat.

Lingkungan kebijakan (*nonstatutory variable effecting implementation*), yaitu:

- a) Kondisi social ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi dimana masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relative mudah menerima program pembaharuan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional.
- b) Dukungan publik sebuah kebijakan, dimana kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan public, sebaliknya kebijakan yang bersifat dis-intensif, misalnya kenaikan harga BBM akan kurang mendapatkan dukungan public.

- c) Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*), dimana kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara, yaitu kelompok dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud untuk mengubah keputusan, dan kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap badan-badan pelaksana.
- d) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor .pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial, sehingga aparat pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

b. Implementasi Kebijakan Model Soren C. Winter

Winter dalam Peters and Pierre memperkenalkan integratif (*Integrated implementation Model*). Winter berpendapat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh formulasi kebijakan, proses implementasi kebijakan, dan dampak atau hasil implementasi kebijakan itu sendiri.

Selanjutnya Winter mengemukakan tiga variabel yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi yakni :

1. Perilaku hubungan antar organisasi: Dimensinya adalah komitmen dan koordinasi antar organisasi.

2. Perilaku implementor (aparatur atau birokrat) tingkat bawah. Dimensinya adalah kontrol politik, kontrol organisasi dan etos kerja norma-norma profesional.

3. Perilaku kelompok sasaran. Kelompok sasaran tidak hanya memberi pengaruh pada dampak kebijakan tetapi juga mempengaruhi kinerja aparat tingkat bawah, jika dampak yang ditimbulkan baik maka kinerja aparat tingkat bawah juga baik demikian dengan sebaliknya.

Perilaku kelompok sasaran meliputi respon positif atau tidak mendukung suatu kebijakan yang disertai adanya umpan balik berupa tanggapan kelompok sasaran terhadap kebijakan yang dibuat.

3. Pengertian Terumbu Karang

Terumbu Karang adalah bangunan ribuan karang yang menjadi tempat hidup berbagai ikan dan makhluk laut lainnya. Bayangkanlah terumbu karang sebagai sebuah kota yang sangat sibuk, bangunannya terdiri dari karang-karang, dengan ikan-ikan dan makhluk laut sebagai penghuninya. Karang yang hidup di laut, tampak terlihat seperti batuan atau tanaman. Tetapi mereka sebenarnya adalah sekumpulan hewan-hewan kecil yang dinamakan polip. Ada dua macam karang, yaitu karang batu (*hard corals*) dan karang lunak (*soft corals*). Karang batu merupakan karang pembentuk terumbu karena tubuhnya yang keras seperti batu. Kerangkanya terbuat dari kalsium karbonat atau zat kapur. Karang baru bekerja sama dengan alga yang disebut zooxanthellae. Karang batu hanya hidup di perairan dangkal dimana sinar matahari masih didapatkan. Karang lunak bentuknya seperti

tanaman dan tidak bekerja sama dengan alga. Karang lunak dapat hidup baik di perairan dangkal maupun di perairan dalam yang gelap (Dahuri R. et al. 2001).

Taman Nasional Taka Bonerate memiliki beberapa pulau yang telah berubah menjadi tempat tinggal/permukiman. Hal ini disebabkan karena kawasan ini dan wilayah di sekitarnya kaya akan sumber daya alam laut yang dapat memenuhi kebutuhan hidup para nelayan. Penduduk yang menetap di kawasan ini telah mencapai 5.101 jiwa yang tersebar di beberapa pulau antara lain Pulau Rajuni 1.272 jiwa, Pulau Tarupa 1.204 jiwa, Pulau Latondu 512 jiwa, Pulau Jinato 651 jiwa dan Pulau Pasi Tallu 1.462 jiwa. Selain objek wisata bahari, kawasan ini juga mempunyai beberapa tempat bersejarah seperti Taka Mariam di mana terdapat meriam kuno milik tentara Belanda dan Taka Gantarang yang menyimpan meriam kembar milik pedagang-pedagang Cina masa lampau.

Taman Nasional Taka Bonerate adalah taman laut yang mempunyai kawasan atol terbesar ketiga di dunia setelah Kwajifein di Kepulauan Marshall dan Suvadiva di Kepulauan Maladewa. Luas total dari atol ini 220.000 hektare dengan sebaran terumbu karang mencapai 500 km². Kawasan ini terletak di Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Sejak Tahun 2005 Taman Nasional Taka Bonerate telah di calonkan ke UNESCO untuk menjadi Situs Warisan Dunia. Dalam rangkaian Hari jadi Kepulauan Selayar di lokasi ini setiap tahunnya diadakan festival yang bertajuk Sail Taka Bonerate atau sebelumnya disebut Takabonerate Island Expedition (TIE).

Sebanyak lima belas buah pulau di Taman Nasional Taka Bonerate sehingga sangat bagus untuk kegiatan menyelam, snorkeling, dan wisata bahari lainnya. Topografi kawasan sangat unik dan menarik, di mana atol yang terdiri dari gugusan pulau-pulau gosong karang dan ratahan terumbu yang luas dan tenggelam, membentuk pulau-pulau dengan jumlah yang cukup banyak. Di antara pulau-pulau gosong karang, terdapat selat-selat sempit yang dalam dan terjal. Sedangkan pada bagian permukaan ratahan terumbu, banyak terdapat kolam kecil yang dalam dan dikelilingi oleh terumbu karang. Pada saat air surut terendah, terlihat dengan jelas daratan kering dan diselingi genangan air yang membentuk kolam-kolam kecil. (Setyo Adi - January 30, 2013)

Spesies flora terdapat berbagai jenis koral (*Pocillopora eydouxi*, *Montipora danae*, *Acropora palifera*, *Porites cylindrica*, *Pavona clavus*, *Fungia concinna*), Pohon kelapa (*Cocos nucifera*), Pandan laut (*Pandanus sp.*), Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*), Ketapang (*Terminalia catappa*), sedangkan untuk spesies fauna terdapat sekitar 295 jenis ikan karang dan berbagai jenis ikan konsumsi yang bernilai ekonomis tinggi seperti kerapu (*Epinephelus spp.*), cakalang (*Katsuwonus*), Ikan Napoleon (*Cheilinus undulatus*), dan baronang (*Siganus sp.*). Sebanyak 244 jenis moluska di antaranya lola (*Trochus niloticus*), kerang kepala kambing (*Cassis cornuta*), triton (*Charonia tritonis*), batulaga (*Turbo*), kima sisik (*Tridacna squamosa*), kerang mutiara (*Pinctada.*), dan nautilus berongga (*Nautilus pompilius*). Jenis-jenis penyu yang tercatat termasuk penyu sisik (*Eretmochelys*

imbricata), penyu hijau (*Chelonia mydas*), dan penyu lekang (*Dermochelys coriacea*). Terumbu karang yang sudah teridentifikasi sebanyak 261 jenis dari 17 famili di antaranya Pocillopora eydouxi, Montipora danae, Acropora palifera, Porites cylindrica, Pavona clavus, Fungia concinna, dan lain-lain. Sebagian besar jenis-jenis karang tersebut telah membentuk terumbu karang atol (*barrier reef*) dan terumbu tepi (*fringing reef*). Semuanya merupakan terumbu karang yang indah dan relatif masih utuh.

Eksistensi Indonesia sebagai salah satu pusat terumbu karang diyakini terus mengalami degradasi. Tentunya masalah itu, akan semakin meluas jika tidak segera diambil langkah-langkah untuk melestarikannya. Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut dunia dengan kekayaan terumbu karangnya. Sayangnya, saat ini kekayaan terumbu karang Indonesia justru terancam rusak akibat berbagai hal, baik karena faktor alam seperti perubahan iklim maupun akibat ulah manusia sendiri. Kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki bangsa Indonesia itu tidak dapat terpelihara, baik akibat perubahan iklim maupun masalah lokal seperti ketidaktahuan, bahkan keserakahan dalam mengeksploitasi kekayaan alam demi mendapat keuntungan tanpa memikirkan kelestarian alam.

Pulau yang dikenal dengan tempat wisata keindahan dibawah laut salah satunya yaitu pulau Rajuni, Tinabo, dan Jinato. Namun masih sering terjadi penrusakan terhadap terumbu karang oleh beberapa oknum-oknum yang tidak

berperasaan dan tidak mentaati hukum dan salah satu yang sering dilakukan adalah menangkap ikan dengan menggunakan BOM dan BIUS ataupun puakat hariamau (Danial, 2016).

Terjadi disalah satu pulau dikeulauan selayar yaitu Desa Jinato yang dahulu terkenal akan kelestarian terumbu karangnya dan terkenal sebagai salah satu tempat wisata yang biasa disebut sebagai taman nasional taka bonerate .karena seringnya terjadi hal ini Bupati Kepulauan Selayar mengeluarkan peraturan daerah mengenai terumbu karang yaitu Perda Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang berbunyi bahwa kawasan terumbu karang memiliki keanekaragaman sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang berpotensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat nelayan, Pengelolaan terumbu karang perlu dikendalikan secara bijaksana sehingga tercipta keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan,

1. Terumbu karang berupa pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian sumberdaya ekosistemnya, perlu dilakukan secara serasi, selaras dan seimbang dengan memberdayakan masyarakat. Pemanfaatan terumbu karang untuk menjadi lebih berpotensi dapat berupa penangkapan ikan atau ikan lainnya attau pengambilan terumbu karang dari hasil budidaya.Bahwa kawasan terumbu karang memiliki keaneka ragaman sumberdaya alam dan jasa

lingkungan yang berpotensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat terutama nelayan

2. Dalam pengelolaan terumbu karang peran serta masyarakat untuk mengelola dan memperoleh informasi mengenai usaha dan kegiatan pemberdayaan sumber daya terumbu karang
3. Bahwa perlu adanya rehabilitasi dalam proses pemulihan atau perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak, agar dapat kembali seperti semula
4. Pemantauan, pengamatan atau evaluasi dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya terumbu karang

Undang-undang yang menjadi pertimbangan sehingga dibentuknya Perda Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Terumbu karang Yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4739), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816) dan masih banyak lagi undang-undang yang menjadi bahan pertimbangan dikeluarkannya peraturan daerah tersebut.

4. Penyebab terjadinya kerusakan terumbu karang

Indonesia memiliki kekayaan laut yang melimpah. Salah satu faktor terbentuknya kekayaan itu adalah adanya terumbu karang. Karang ini memang banyak sekali fungsi. Dia menjadi tempat tinggal ikan dan biota laut lainnya. Lautan yang memiliki terumbu karang sehat biasanya menjadi lokasi penyelaman yang direkomendasikan. Sebab, keindahan laut akan terpancar di sana. Hanya saja, terumbu karang di Indonesia diperkirakan sudah 30 persen yang rusak. Untuk terumbu karang dunia, total sudah mencapai 10 persen yang rusak. Terumbu karang, selain berfungsi untuk kembangbiak ikan, pelindung pantai dari erosi dan abrasi, juga bermanfaat untuk sektor pariwisata. Terumbu karang merupakan sumber mata pencaharian bagi masyarakat pesisir dan 60 persen penduduk Indonesia yang tinggal di daerah pesisir.

Namun dewasa ini, jumlah terumbu karang di dunia dan tentu saja di Indonesia juga, menurun drastis. Kerusakan yang dialami terumbu karang disebabkan oleh dua hal, oleh manusia dan alam. Berikut adalah daftar penyebab kerusakan yang dialami oleh terumbu karang:

1. Terumbu karang yang hidup di dasar laut merupakan sebuah pemandangan yang cukup indah. Banyak wisatawan melakukan penyelaman hanya untuk melihatnya. Sayangnya, tidak sedikit dari mereka menyentuh bahkan membawa pulang terumbu karang tersebut. Padahal, satu sentuhan saja dapat membunuh terumbu karang.
2. Membuang sampah ke laut dan pantai yang dapat mencemari air laut.
3. Mungkin tidak banyak yang sadar, penggunaan pupuk dan pestisida buatan pada lahan pertanian turut merusak terumbu karang di lautan. Karena meskipun jarak pertanian dan bibir pantai sangat jauh, residu kimia dari pupuk dan pestisida buatan pada akhirnya akan terbang ke laut melalui air hujan yang jatuh di lahan pertanian.
4. Boros menggunakan air, karena semakin banyak air yang digunakan semakin banyak pula limbah air yang dihasilkan dan akhirnya mengalir ke laut. Limbah air tersebut biasanya sudah mengandung bahan kimia.

5. Terumbu karang merupakan tujuan wisata yang sangat diminati. Kapal akan lalu lintas di perairan. Membuang jangkar pada pesisir pantai secara tidak sengaja akan merusak terumbu karang yang berada di bawahnya.
6. Penambangan pasir atau bebatuan di laut dan pembangunan pemukiman di pesisir turut merusak kehidupan terumbu karang. Limbah dan polusi dari aktifitas masyarakat di pesisir secara tidak langsung berimbas pada kehidupan terumbu karang. Selain itu, sangat banyak yang pengambilan karang untuk bahan bangunan dan hiasan akuarium.
7. Masih banyak yang menangkap ikan di laut dengan menggunakan bom dan racun sianida. Ini sangat mematikan terumbu karang.
8. Selain karena kegiatan manusia, kerusakan terumbu karang juga berasal dari sesama makhluk hidup di laut. Siput drupella salah satu predator bagi terumbu karang.
9. Pengundulan hutan di lahan atas sedimen hasil erosi dapat mencapai terumbu karang di sekitar muara sungai, sehingga mengakibatkan kekeruhan yang menghambat difusi oksigen ke dalam polip atau hewan karang.

10. Pengerukan di sekitar terumbu karang Meningkatkan kekeruhan yang mengganggu pertumbuhan karang.
11. Penangkapan ikan hias dengan menggunakan bahan beracun (misalnya Kalium Sianida) Mengakibatkan ikan pingsan, mematikan karang dan biota avertebrata.
12. Penangkapan ikan dengan bahan peledak Mematikan ikan tanpa dikriminasi, karang dan biota avertebrata yang tidak bercangkang.

Sementara itu, ancaman terhadap ekosistem terumbu karang juga dapat disebabkan oleh adanya faktor alam. Baik berupa angin topan, badai Tsunami, gempa bumi, pemanasan oleh *Cots* (*criwn of thoms starfish*) dan pemanasan global yang menyebabkan pemutihan karang

5. Pengelolaan terumbu karang

Manajemen sebagai suatu proses, melihat bagaimana cara orang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Pengelolaan ekosistem terumbu karang pada hakikatnya adalah suatu proses pengontrolan terhadap tindakan manusia, agar pemanfaatan ekosistem sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara bijaksana dengan mengindahkan kaidah kelestarian lingkungan. Kebijakan nasional pengelolaan terumbu karang disusun berdasarkan prinsip-prinsip yaitu Keseimbangan antara intensitas dan variasi pemanfaatan terumbu karang, Pengelolaan sesuai dengan

prioritas kebutuhan masyarakat lokal dan ekonomi nasional, Kepastian hukum melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan pengelolaan dan pemanfaatan terumbu karang yang optimal, Pengelolaan yang berkeadilan dan berkesinambungan, Pendekatan pengelolaan secara kooperatif antara semua pihak terkait, Pengelolaan terumbu karang sesuai dengan semangat otonomi daerah.

Strategi Pengelolaan Terumbu Karang

Suatu pengelolaan yang baik adalah yang memikirkan generasi mendatang untuk dapat juga menikmati sumberdaya yang sekarang ada. melestarikan, melindungi, mengembangkan, memperbaiki dan meningkatkan kondisi atau kualitas terumbu karang dan sumberdaya yang terkandung di dalamnya bagi kepentingan seluruh lapisan masyarakat serta memikirkan generasi mendatang. Mendorong dan membantu pemerintah daerah untuk menyusun dan melaksanakan program-program pengelolaan sesuai dengan karakteristik wilayah dan masyarakat setempat serta memenuhi standar yang ditetapkan secara nasional berdasarkan pertimbangan-pertimbangan daerah yang menjaga antara upaya eksploitasi dan upaya pelestarian lingkungan. mendorong kesadaran, partisipasi dan kerjasama/kemitraan dari masyarakat, pemerintah daerah, antar daerah dan antar instansi dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan terumbu karang.

Beberapa alasan yang menyebabkan sulitnya menggambarkan suatu kondisi terumbu karang dengan metode survei yang ada saat ini (Suharsono, 1994)

Terumbu karang yang tumbuh di tempat geografis yang berbeda mempunyai tipe yang berbeda, Ukuran individu atau koloni sangat bervariasi dari beberapa centimeter hingga beberapa meter, Satu koloni karang dapat terdiri beberapa individu sampai jutaan individu, Bentuk pertumbuhan sangat bervariasi seperti bercabang, masif, merayap, seperti daun, dan sebagainya. Tata nama jenis karang masih relatif belum stabil dan adanya perbedaan jenis yang hidup pada lokasi geografis yang berbeda, serta adanya variasi morfologi dari jenis yang sama yang hidup pada kedalaman yang berbeda maupun tempat yang berbeda.

B. Kerangka Pikir

Kerusakan terumbu karang di taman nasional taka bonerate menjadi pusat perhatian karena yang menjadi daya tarik tempat wisata dipulau ini adalah keindahan bawa lautnya yang dihiasi dengan keindahan terumbu karang. adapun penyebab kerusakan terumbu karang salah satunya adalah penangkapan ikan yang berlebih sedangkan masalah dalam pengelolaan terumbu karang yaitu infrastruktur yang tidak memadai, meningkatnya oknum-oknum yang merusak, *overfishing* (penangkapan sumber daya berlebih), pemutihan karang (*coral bleaching*) akibat pemanasan global dan sedimentasi pencemaran dari darat.

Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002), mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa "implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan". Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh McLaughlin (dalam Nurdin dan Usman, 2004). Adapun Schubert (dalam Nurdin dan Usman, 2002:70) mengemukakan bahwa "implementasi adalah sistem rekayasa." Subarsono (2008,89). Oleh karena itu sesuai dengan pemaparan diatas maka implemetasi dalam pengelolaan terumbu karang dilakukan untuk mengetahui pemanfaatan terumbu karang, kondisi dalam SDM, rehabilitasi keadaan terumbu karang dan pengawasan terumbu karang. pengimplementasian tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2010 yang berisi bahwa pengelolaan terumbu karang perlu dikendalikan secara bijaksana sehingga tercipta keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan dalam mendukung pembanguan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Selanjutnya sebagai dasar berpijak membahas Implementasi Kebijakan Pengelolaan Terumbu Karang tersebut diatas maka penulis mencoba mengambarkan suatu skema yang diharapkan dapat lebih membantu dalam penelitian.

BAGAN KERANGKA FIKIR



C. Fokus Penelitian

1. Cara pengelolaan terumbu karang di Taman Nasional Taka Bonerate Kepulauan selayar.
2. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Terumbu Karang.

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka dapat digambarkan tentang bagaimana pengelolaan terumbu karang yang dapat didefinisikan sebagai cara atau usaha untuk mengetahui cara pengelolaan terumbu karang sehingga terumbu karang dapat terlindungi dengan baik dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Terumbu Karang Di Taman Nasional Taka Bonerate Kepulauan Selayar.

Pengelolaan terumbu karang di Taman Nasional Taka Bonerate khususnya Didesa Jinato diimplementasikan dengan cara

1. Pemanfaatan Terumbu Karang tidak hanya keindahannya melainkan juga sebagai pelindung pantai, mengurangi pemanasan global dan sebuah ekosistem, secara langsung terumbu karang menjadi penunjang Kehidupan berbagai jenis makhluk hidup yang ada disekitarnya terutama tempat hidup untuk berbagai jenis biota laut seperti ikan.
2. Melihat kondisi sumber daya manusia yang merupakan seluruh kemampuan atau potensi penduduk yang berada disekitar pesisir ataupun wilayah desa tersebut ataupun karakteristik, ataupun sosial ekonominya yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pengelolaan.
3. Rehabilitas keadaan Terumbu karang atau pemulihan kembali lokasi keadaan terumbu karang yang telah rusak .

4. Pengawasan Sumber Daya Terumbu Karang dilakukan dengan melibatkan peran aktif masyarakat dalam membantu menangani pengelolaan terumbu karang.
5. Faktor pendukung pengelolaan terumbu karang adanya kesadaran dari masyarakat, meningkatnya penanganan terhadap pengelolaan terumbu karang, tidak sedikit masyarakat yang mulai taat aturan
6. Faktor penghambat dari pengelolaan terumbu karang yaitu Perilaku hubungan organisasi Perilaku implementor tingkat bawah, Perilaku menyimpang kelompok masyarakat.
7. Tujuan implementasi kebijakan pengelolaan terumbu karang yaitu untuk mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan pengelolaan terumbu karang dengan baik agar menjadi tempat wisata terbaik dan mampu memiliki daya saing yang baik.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Jinato, waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih dua bulan , yang menjadi alasan memilih lokasi tersebut karena lokasi tersebut adalah salah satu tempat wisata terbaik yang ada di Kepulauan Selayar namun mengalami penurunan minat wisatawan karena kerusakan Terumbu karang, dimana yang menjadi daya tarik pulau ini adalah keindahan terumbu karang dibawah laut.

Penelitian dilakukan terhitung mulai tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan 11 April 2017.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif yaitu dengan metode wawancara dan observasi lapangan, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pejabat struktural dan tokoh-tokoh masyarakat di Taman Nasional Taka Bonerate Kepulauan Selayar.

2. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian ini bersifat Fenomenologi yaitu mencoba atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu.

C. Sumber Data

Sumberdata yang di maksud dalam penelitian iniadalahsubjekdari manadata dapat diperoleh. Dimana data hasil penelitian di dapatkan dua sumberdata yaitu sebagai berikut

- a) Data PrimerData primer yang dimaksud adalah data yang akan diperoleh secara langsung dari informasi kunci berupa informasi dan persepsi serta tanggapan yang berkaitan dengan penelitian ini,yaitu dengan melakukan wawancara (*interview*) dengan beberapa pejabat structural dan took masyarakat di Kepulauan Selayar.
- b) Data sekunder Data Sekunder yang akan diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang diperlukan dalam rangka melengkapi informasi yang diperoleh dari sumber data primer. Data sekunder diperoleh melalui literatur buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengelolaan terumbu karang.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah informan dan responden dari berbagai pihak. Berikut ini daftar informan penelitian

Tabel 1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Dinas Perhubungan	1 orang
2	Dinas perikanan	1 oarang
3	Jagawana	2 orang
4	Masyarakat	5 orang
Jumlah		9 Orang

Informan wawancara Penelitian

No	Nama Informan	Inisial	Jabatan	Ket
1	Arif	AR	Staf jagawana	L
2	Abdul Gappar	AGP	Nelayan	L
3	Anwar	ANR	Staf LSM	L
4	Ir.Marjani Sultan M,si	MS	Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan	P
5	Syamsuddin	SYM	Tokoh Masyarakat	L
6	Arman	AN	Staf jagawana	L
7	Yani	YN	Staf dinas kelautan dan perikanan	P

E. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan penulis sebagai berikut

1. Observasi, penulis melakukan penelitian langsung ke objek penelitian untuk melihat aktivitas sesungguhnya yang dilakukan di lapangan untuk mengawasi yang dilakukan masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang di Taman Nasional Taka Bonerate Kepulauan Selayar.
2. Wawancara, penulis mengadakan dialog langsung dengan informan yang dinilai dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat mengenai hal yang menyangkut Implementasi Pengelolaan Terumbu Karang di Taman Nasional Taka Bonerate Kepulauan Selayar.
3. Dokumentasi, penulis mengkaji naskah-naskah, buku-buku, literature dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan Implementasi Pengelolaan Terumbu Karang.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data atau penafsiran data merupakan proses mencari dan menyusun atur secara sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan wawancara dan yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang focus yang dikaji dan menjadikannya sebagai temuan untuk mengklasifikasi, mereduksi dan menyajikan. (Muhadjir dalam Tohirin, 2012).

Langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis dalam menganalisis data merujuk pada Miles dan Humberman adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Tahap reduksi data dan langkah-langkah reduksi data antara lain:

- a. Meringkas data dan kontak dengan orang, kejadian dan situasi di lokasi penelitian
- b. Pengkodean data
 Pengkodean data hendaknya memperhatikan setidaknya-tidaknya empat hal sebagai berikut;
 - 1) Digunakan symbol atau ringkasan
 - 2) Kode dibangun dalam suatu struktur tertentu
 - 3) Kode dibangun tingkat rinci tertentu.
- c. Dalam analisis selama pengumpulan data adalah pembuatan data objektif
- d. Membuat catatan reflektif
- e. Membuat catatan marjinal
- f. Menyimpan data

2. Tahap penyajian data

Pada tahap ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan dari data yang dikumpulkan dan analisis sebelumnya mengingat bahwa peneliti banyak menyusun teks nuratif.

G. Keabsahan Data

Penulis atau peneliti memantau perkembangan yang ada di lapangan untuk melakukan pengamatan secara langsung mengenai apa yang dilakukan oleh pengelola terumbu karang, sehingga data yang dikumpulkan oleh peneliti memiliki keabsahan data yang akurat dan untuk memperoleh keabsahan data tersebut dalam penelitian ini, yakni penulis atau peneliti memenuhi empat kriteria utama, sebagai berikut:

1. Derajat kepercayaan, kreadibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. ada beberapa teknik untuk mencapai kreadibilitas ialah teknik; teknik triangulasi, sumber, pengecekan anggota, perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, diskusi teman sejawat, dan pengecekan kecakupan referensi.
2. Ketergantungan, kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data sehingga data dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Kesalahan sering dilakukan oleh manusia itu sendiri terutama peneliti karena keterbatasan pengalaman, waktu, pengetahuan. Cara untuk menetapkan bahwa proses penelitian dapat dipertanggung jawabkan.
3. Kepastian, kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil yang dilakukan oleh materi yang ada pada pelacakan audit.

4. Keteralihan berupa teknik untuk mencapai kredibilitas ialah teknik: teknik triangulasi ,sumber,pengecekan anggota,perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan,diskusi terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kesalahan sering dilakukan oleh manusia itu sendiri terutama peneliti karena keterbatasan pengalaman.

Salah satu cara paling penting dan mudah dalam menguji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi. Menurut Sugiyono (2012:127),teknik pengumpulan data tringulasi di artikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai macam teknik pengumpulan data sumber data yang telah ada. Menurut Sugiyono ada tiga macam tringulasi yaitu

a. Tringulasi sumber

Tringulasi sumber berarti membandingkan dengan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi melalui sumber yang berbeda.

b. Tringulasi teknik

Tringulasi teknik untuk menguji kredibilitis data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda,misalnya data yang di peroleh dengan wawancara,lalu dicek dengan observasi,dokumentasi atau kuesioner.

c. Tringulasi waktu

Waktu juga sering di pengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih

segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga kredibel.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi atau Karakteristik Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Selayar

Kabupaten kepulauan selayar ingin meningkatkan tata kelolaan pemerintahan yang bagus serta mengembangkan pembinaan kehidupan masyarakatnya, adapun visi dan misi kabupaten kepulauan selayar yaitu

Visi :“Selayar Sebagai Kabupaten Kepulauan Yang Maju, Sejahtera Dan Relegius”

Misi :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Meningkatkan Infrastruktur dasar Masyarakat
3. Memberdayakan Ekonomi Kerakyatan
4. Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya alam Secara Berkelanjutan
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Penegakan Hukum
6. Mengembangkan Pembinaan Kehidupan Beragama

Letak wilayah Kab. Kepulauan Selayar terletak di sebelah Timur dan Selatan Laut Flores, Selat Makassar dan Laut Flores di sebelah Barat serta Teluk Bone di sebelah Utara dengan letak Geografis yaitu berada pada Kooordinat 5°42' – 7°35' Lintang Selatan dan 120°15' – 122°30' Bujur Timur.

1). Batas Wilayah

- a) Sebelah Utara : Selat Bira / Polres Bulukumba
- b) Sebelah Selatan : Laut Flores / Polda NTT
- c) Sebelah Timur : Laut Flores / Polda Sultra
- d) Sebelah Barat : Laut Flores / Selat Makassar

2). Luas Wilayah.

Luas Wilayah Kab.Kepulauan Selayar 24.575.000 Km² Km² yang terdiri dari 23.571,65 Km² berupa Lautan dan memiliki beberapa Pulau dengan total luas daratan 903,35 Km².

3). Pemerintahan.

Nama Bupati/Walikota : Drs. H. Syahrir Wahab, MM

Nama Wakil Bupati/Walikota : H. Syaiful Arif, SH

Nama Ketua DPRD TK I/II : Hasanuddin Chaer, BA

Tabel III

luas wilayah

No	Kecamatan	Nama kepala Kecamatan	Luas wil (KM ²)	Jml Kel	Jml Desa	Jml Dsn	Jml RW	Jml RT
1	Bontomatene	Ir. Andi Massaile	159,92	2	9	65	131	138
2	Buki	Aji Sumartono, S.Stp, MM	82,73	-	7	-	-	-
3	Bontomanai	Nur Salam, SE	115,56	-	8	44	44	44
4	Benteng	Drs. H. Syafruddin, MH	7,12	3	-	-	-	-
5	Bontoharu	Drs.Martajuddin,M H	129,75	2	6	-	-	-
6	Bontosikuyu	Drs.A.Ahyadin,	199,11	-	11	-	-	-

		MH						
7	Pasimasunggu	Drs. Suardi	144,50	-	6	-	-	-
8	Pasimasunggu Timur	Arifuddin, SE	47,93	-	4	-	-	-
9	Takabonerate	Rahman	221,07	-	8	-	-	-
10	Pasimarannu	Andi Abdurrahman, Se, Msi	176,35	-	6	25	-	-
11	Pasilambena	Sari Bintang	102,99	-	5	-	-	-
Jumlah			1357,03	5	70	134	175	182

a. Profil Taman Nasional Takabonerate

Potensi Wisata di Kabupaten Kepulauan Selayar cukup banyak meliputi wisata sejarah, wisata budaya, wisata alam dan wisata bahari. Salah satu yang terkenal adalah Taman Nasional Taka Bonerate yang terletak di kecamatan Takabonerate. Jumlah wisatawan yang mengunjungi Taman Nasional Taka Bonerate pada tahun 2009 mencapai 576 orang. Kawasan ini terdiri dari 21 buah pulau serta puluhan taka dan bungin, umumnya terbentuk dari endapan pasir dan biosfer. Taman Nasional Taka Bonerate memiliki karang atol terbesar ketiga di dunia (terbesar di Asia Tenggara) yaitu setelah Kwajifein di Kepulauan Marshall dan Suwadiwa di Kepulauan Maladewa. Luas atol tersebut sekitar 220.000 hektare, dengan terumbu karang yang tersebar datar seluas 500 km². Dalam rangkaian Hari jadi Kepulauan Selayar di lokasi ini setiap tahunnya diadakan festival yang bertajuk *Takabonerate Island Expedition* Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa kegiatan ini sudah masuk dalam kalender kegiatan pariwisata nasional dan rencananya pada tahun 2012 akan ditingkatkan menjadi "Sail Taka Bonerate. Seperti penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya,

Takabonerate Island Expedition akan diisi kegiatan lomba rutin seperti *Takabonerate International Fishing Tournament*, menyelam, lomba foto di bawah air dan lomba renang antar pulau terbuka dengan jarak antara lima hingga enam kilometer.

Taman Nasional Taka Bonerate merupakan taman laut yang mempunyai taka yang sangat luas mencapai 220.000 Ha. terumbu karang yang menyelimutinya, menjadi Taka Bonerate sebagai keindahan bawah laut yang tersembunyi. Potensi keindahan terumbu karang tepi, terumbu karang penghalang, dan atoll memberikan keunikan yang beragam. Dengan adanya tiga tipe terumbu karang menjadikan taman laut ini mempunyai biodiversitas keanekaragaman hayati yang tinggi. Menurut data base kondisi biotik Taman Nasional Taka Bonerate terdapat 49 genera jenis karang, terdapat 9 jenis Lumut dari 12 jenis yang ada di Indonesia, 83 spesies Makro Alga; 362 spesies Ikan; 216 Ekinodermata; 3 jenis Mamalia laut; dan 33 spesies Burung. Selain itu bentuk dan kenampakan pulau-pulau kecil yang memukau, pasir putih yang menyilau, dan didukung budaya serta masyarakat yang ramah dan menarik.

Dengan potensi alam yang begitu kaya maka Taman Nasional Taka Bonerate menjadi surganya wisata bahari dan penggemar olahraga air terutama menyelam. Daya tarik penyelam mulai dari *spot dive* untuk pemula hingga *spot dive* yang menantang dan ekstrim seperti penyelam drop kedalaman hingga penyelaman menyaksikan biota menantang seperti Muray, Hiu, Ikan Pari dan Penyu. Dan yang cukup menarik adalah banyaknya objek diperuntukan bagi penggemar fotografi bawah laut.

b. Profil Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Selayar

Kabupaten kepulauan selayar sebagai dinas perikanan dan kelautan memiliki visi dan misi yaitu :

Visi : Selayar menjadi pusat industri kelautan dan perikanan berbasis masyarakat.

Misi : Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur, nelayan, dan pembudidaya. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana penunjang perikanan. Mengembangkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Meningkatkan pelestarian sumberdaya alam kelautandan perikanan. Meningkatkan daya saing produk olahan hasil perikanan.kondisi letak geografis Kabupaten Kepulauan Selayar yang 48 persen wilayahnya terdiri dari bentangan laut dan pesisir membuat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, melalui Dinas Kelautan & Perikanan tetap berharap dan bertekad menjadikan potensi kelautan & Perikanan sebagai leading sektor unggulan utama pada rangkaian program pembangunan daerah untuk tahun 2013 dan salah satu upaya pemerintah adalah menggenjot peningkatan taraf kesejahteraan rakyat khususnya masyarakat nelayan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Marjani Sultan Kepala Dinas Kelautan & Perikanan Kep.Selayar telah mencanangkan sejumlah program skala prioritas dengan menyadari posisinya sebagai instansi teknis yang tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Bupati dalam rangkaian pembinaan sector kelautan & perikanan. Program itu sendiri, terdiri dari peningkatan system motorisasi melalui pengalokasian sejumlah kegiatan dan program peningkatan serta program pemberdayaan masyarakat

nelayan melalui pemberian bantuan dan peralatan. Menurutnya, pemerintah kabupaten telah mendistribusikan bantuan mesin katinting dan sampan serta jaring kepada masyarakat nelayan pesisir yang selama ini daya jangkauya relatif terbatas hanya sampai ke pinggir pantai akibat minimnya fasilitas perahu atau kapal penangkap nelayan tradisional setempat. Melalui program pendistribusian mesin katinting ini, pihak Dis KP Kepulauan Selayar berharap, “kiranya, nelayan tradisional Kabupaten Kepulauan Selayar, dapat meninggalkan budaya penangkapan Sumber Daya Ikan yang selama ini hanya mengandalkan dayun dan layar”. Lebih jauh, nelayan tradisional Bumi Tanadoang Selayar diharapkan mampu menjangkau perairan laut dalam, tempat bersarangnya ikan-ikan besar. Terkait dukungan penuh Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar juga telah mencanangkan program budidaya ikan karang di bawah koordinasi bidang budidaya perikanan budidaya seiring dengan lahirnya blue print percepatan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka perwujudan Selayar sebaga Pusat Budidaya Ikan Karang. Dan sebagai bentuk apresiasi atas dukungan tersebut, terhitung sejak Tahun 2009-2010 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah mengalokasikan anggaran dana pembangunan keramba jarring apung dan keramba tancap yang dapat dilihat langsung di sepanjang pantai Padang, Kecamatan Bontoharu dan telah melakukan serangkaian kegiatan pembinaan terhadap kelompok nelayan tradisional yang sehari-harinya menggeluti kegiatan industri pengolahan sumber daya ikan. Sebut saja diantaranya, industri pengolahan terasi, ikan asin, dan abon-abon, ujar Marjani mencontohkan. Marjani

menandakan, bahwa sebagai Kepala Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, Dinas yang dinaunginya itu, telah berhasil membentuk dan melahirkan sedikitnya 42 daerah perlindungan laut pada 42 wilayah desa pesisir, untuk menunjang berjalan efektifnya sisi pengawasan perairan laut Kabupaten Kepulauan Selayar melalui dukungan Peraturan Desa. Bahkan belum lama ini, kelompok masyarakat pengawas perairan laut, asal Desa Bontolempang dan Desa Bonerate yang direkomendasikan mewakili Kabupaten Kepulauan Selayar dalam event kejuaraan bertaraf nasional di Jakarta berhasil keluar sebagai juara umum lomba antar kelompok pengawas perairan laut di tanah air.

Tabel IV Beberapa Kasus Pelanggaran Hukum oleh Masyarakat Taka Bonerate Kab. Kepulauan Selayar

No	Penegakan Hukum	Pelanggaran	Sanksi (Denda)
1	Pasal 84 Jo pasal 8 ayat 1 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan	Pemboman ikan (Handak),	6 tahun penjara dengan denda paling banyak Rp1.200.000.000
2	Pasal 98 Jo pasal 42 ayat 3 UU RI No. 45 tahun 2009 No. 31 tahun 2004 tentang perikanan	Kelengkapan kapal tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB)	1 (satu) tahun penjara dengan denda paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
3	Pasal 92 Jo pasal 26 ayat 1 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan	Perizinan usaha	8 tahun penjara dengan denda paling banyak Rp1.500.000.000
4	Pasal 85 Jo pasal 9 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan	penangkapan dengan menggunakan alat bantu berupa kompressor	5 tahun penjara dengan denda paling banyak Rp2.000.000.000

Masyarakat yang menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan maupun melakukan kegiatan budidaya tentunya sangat mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menanggulangi kegiatan-kegiatan pemanfaatan sumberdaya yang tidak bertanggungjawab atau alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan (bahan peledak) yang digunakan oleh nelayan di Kawasan Taka Bonerate tidak lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Dari hasil pengamatan dan penyelesaian tindak pidana perikanan selama ini, kecenderungan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah:

- a. Keinginan untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan yang lebih banyak dengan cara yang cepat dan tidak membutuhkan tenaga yang besar;
- b. Sudah merupakan turun-temurun dalam keluarga ataupun lingkungannya, sehingga hanya cara tersebut yang dapat dilakukan;
- c. Tidak memiliki keahlian menggunakan alat tangkap lain;
- d. Keterbatasan modal usaha untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan.

B. Implementasi kebijakan Pengelolaan Terumbu Karang Di Taman

Nasional Taka Bonerate

Sesuai dengan perda nomor 8 tahun 2010 tentang pengelolaan terumbu karang ditaman nasional taka bonerate pemerintah menimbang bahwa kawasan terumbu karang memiliki keanekaragaman sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang berpotensi ekonomi, yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat nelayan, pengelolaan terumbu karang perlu dikendalikan secara bijaksana sehingga tercipta keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan agar hal itu terjadi pemerintah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan pengelolaan terumbu karang.

Undang-Undang Perikanan No.31 Tahun 2004 telah menetapkan berbagai upaya dalam menjaga keberlanjutan sumberdaya perikanan. Terumbu karang adalah salah satu sumberdaya perikanan di Indonesia. Undang-Undang ini menetapkan bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya pencemaran dan atau pengrusakan terhadap sumberdaya perikanan serta lingkungannya.

Agar terlaksana upaya tersebut di atas, diterapkan sanksi apabila terjadi pelanggaran. Misalnya bila secara sengaja melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, bahan kimia, bahan biologis atau dengan cara-cara yang merusak. Penegakan hukum secara tegas harus diterapkan terhadap perusak terumbu karang

Pengembangan pesisir yang memang di nilai cukup menjanjikan adalah selain dengan menjadikannya sebagai daerah penangkapan ikan ataupun budidaya yaitu dengan menyulam wilayah pesisir tersebut menjadi sebuah tempat yang selalu di gemari yakni sebagai tempat pariwisata, apalagi di tawarkan dengan sajian yang komplit seperti wisata bisnis (*business tourism*), wisata pantai (*seaside tourism*), wisata budaya (*cultural tourism*), wisata pemancingan (*fishing tourism*), wisata pesiar (*cruise tourism*), wisata olahraga (*sport tourism*), dan lain lain memang bila di tinjau dari segi input perekonomian mendappaat hasil yang positif. Tapi yang perlu juga di perhatikan apabila sudah terciptanya sebuah kegiatan wisata di daerah pesisir maka banyak juga hal yang perlu diperhatikan terutama masalah ekologisnya. Hal ini memang penting bercermin pula pada pesisir yang sudah maju yang tidak memperhatikan kondisi ekologi dalam pengembangannya maka akan terjadi pencemaran, overfishing, degradasi fisik habitat pesisir, dan abrasi pantai. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang terpadu dan berkelanjutan yang utamanya memperhatikan konsep yang simbang antara pembangunan dan konservasi.

1. Dalam perjalanan pengelolaannya yang perlu di ingat yaitu perlu adanya koordinasi dengan pengelola Taman Nasional untuk menentukan lokasi mana mana saja yang dapat dimanfaatkan sebagai pengembangan objek wisata. Karena sesuai yang di sebutkan di atas, pulau taka bonerate memiliki zona-zona yang berbahaya jika tidak ada pemberitahuan dari penjaga pulau sehingga bisa menimbulkan kecelakaan

2. Upaya yang harus dilakukan dalam membenahi strategi pengembangan wisata laut adalah peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pengembangan wisata laut, serta penyediaan sistem informasi pariwisata dan program promosi.
3. Melakukan pemetaan terhadap potensi pariwisata bahari yang dimiliki, yaitu berupa nilai, karakteristiknya, infrastruktur pendukungnya, dan kemampuannya dalam menopang perekonomian. Dengan demikian dapat ditentukan pariwisata bahari mana yang harus segera dibangun dan mana yang hanya perlu direvitalisasi
4. Menyusun rencana investasi dan pembangunan atas berbagai informasi yang telah kita dapatkan dari pemetaan diatas. Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan ini adalah, bahwa kita tidak hanya akan membangun sebuah pariwisata bahari saja Namun juga perlu di perhatikan faktor pendukungnya seperti akses transportasi, telekomunikasi dll. Dengan demikian rencana pengembangan pariwisata bahari dapat terukur dan tetap sasaran.
5. Pengembangan wisata laut Indonesia lebih diarahkan dan dipacu guna menuju upaya pengembangan Ekowisata/Wisata Ramah Lingkungan yang justru berpola pada upaya pemanfaatan optimal yang sekaligus menyelamatkan lingkungan daya alam laut. Dengan demikian, masyarakat akan peduli terhadap sumber daya wisata karena memberikan manfaat karena pada akhirnya, masyarakat akan merasakan kegiatan wisata sebagai suatu kesatuan dalam kehidupannya

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan salah satu polisi jagawana mengatakan bahwa

“sementara ini pengelolaan terumbu karang masih terus dilakukan meskipun sedikit dari masyarakat yang membantu namun juga sebagian ikut membantu ,kami juga melakukan sosialisasi kepada nelayan agar berhati-hati saat menangkap ikan sehingga tidak merusak terumbu karang kami juga memperingati mereka agar tidak menangkap ikan secara ilegal yang dapat merusak terumbu karang”.(Hasil wawancara dengan Bapak ARF,02 maret 2017).

Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan terumbu karang masi perlu adanya sarana dan prasarana dari pemerintah agar lebih memperhatikan dalam mengimplementasikan pengelolaan terumbu karang.

Pengelolaan terumbu karang bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan. White and Alcalá (1988) dalam Sondita dan Bachtiar (2002) mengelompokan pendekatan dasar menjadi 7 macam yaitu:

1. Membagi wilayah. Pendekatan konservasi ini membagi terumbu karang menjadi beberapa macam wilayah yang digunakan untuk bermacam-macam keperluan dan level penggunaan.
2. Menutup temporer. Konservasi dilakukan dengan cara menutup terumbu selama beberapa waktu (minggu, bulan) pada musim reproduksi hewan atau tanaman yang penting untuk dilindungi.
3. Menutup dan membuka selama beberapa waktu. Pendekatan ini membolehkan penggunaan terumbu karang selama beberapa waktu yang diselingi oleh penutupan untuk mengembalikan terumbu dari dampak penggunaannya.
4. Menutup permanen suatu wilayah kecil yang terpilih (suaka laut/perikanan).

5. Menentukan suatu level penggunaan yang dipebolehkan. Jika melewati daya dukungnya, penggunaan terumbu karang yang berlebihan dapat bersifat merusak. Oleh karena itu, pengaturan tentang batas maksimal penyelam perhari atau batas penangkapan ikan per tahun merupakan aturan pengelolaan yang perlu dipikirkan.
 6. Melarang atau membatasi alat-alat eksploitasi yang tidak dapat diterima. Misalnya, jaring yang berukuran kecil atau muro-ami yang batunya menyentuh terumbu.
 7. Membuat batas-batas ukuran penangkapan. Pengambilan spesies-spesies yang diijinkan diatur dengan ketentuan batas-batas maksimum atau minimum untuk menjamin bahwa biota yang boleh ditangkap sempat bertelur sebelum mati.
- Pengelolaan terumbu karang dilakukan dengan tujuan untuk terciptanya sistem dan mekanisme pengelolaan terumbu karang yang berwawasan lingkungan, terciptanya manfaat ekonomi sumberdaya terumbu karang secara maksimal dalam rangka peningkatan kesahatan masyarakat serta terpeliharanya kelestarian fungsi-fungsi alamiah ekosistem terumbu karang agar tetap dapat menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

C. Pemanfaatan Terumbu Karang Di Taman Nasional Taka Bonerate

Sebagai sebuah ekosistem, secara langsung terumbu karang menjadi penunjang kehidupan berbagai jenis makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Terumbu karang menyediakan tempat tinggal, mencari makan, dan berkembang biak bagi berbagai biota laut. Rusaknya terumbu karang akan berpengaruh langsung bagi

kelangsungan hidup dan kelestarian berbagai hewan dan tumbuhan di laut Terumbu karang, secara langsung maupun tidak langsung, menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat khususnya di taman nasionala taka bonerate banyaknya wisatawan yang datang untuk berkunjung demi melihat keindahan bawah laut secara tidak langsung menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat di desa jinato tersebut.

Pengelolaan terumbu karang menjadi salah satu yang harus diutamakan pemanfaatannya baik itu pemanfaatan dari segi ekologi, ekonomi maupun dari segi pemanfaatan sosialnya, Mengingat besarnya manfaat yang dapat dirasakan oleh manusia, baik secara langsung amupun tidak langsung, maka perlu dijaga dan dilestarikan. Pun bagi terumbu karang yang rusak, seperti adanya pemutihan terumbu karang, perlu dilakukan upaya-upaya rehabilitasi. Sehingga berbagai manfaat terumbu karang tersebut akan tetap dapat dirasakan oleh manusia, saat ini dan pada masa yang akan datang.

Hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat mengenai pemanfaatan terumbu karang di kediamannya di desa jinato mengatakan bahwa

” perlu dilakukan pengelolaan terumbu karang dengan baik karena kalau terumbu karang dikelola dengan baik manfaatnya juga akan baik misalnya kemarin ada wistawan yang datang dia datang karena Cuma mau melihat keindahanya terumbu karang di bawah laut banyak juga anak-anak mahasisiwa yang menjadikannya tempat untuk meneliti dengan aadnya pengelolaan yang baik maka pemanfaatannya juga pasti akan baik khususny bagi para nelayan.” (wawancara dengan Ibu MH pada tanggal 01 maret 2017)

Wawancara diatas secara tidak langsung menekankan pentingnya pengelolaan Terumbu karang agar pemanfaatannya juga berdampak bagi kesenjangan dan kehidupan masyarakat ditempat. Karena setelah mengenali maka cinta dan peliharalah terumbu karang karena pemanfaatannya dan memiliki arti yang amat penting bagi kehidupan manusia. Baik dari segi ekonomi maupun sebagai penunjang kegiatan pariwisata.

Hasil wawancara dengan salah seorang staf dinas perikanan dan kelautan di kantor wilayah dua Desa Jinato yang mengatakan bahwa

“ sebenarnya pemanfaatan terumbu karangnya sudah ada kalau menurut saya hanya saja semakin meningkat kita mengelola terumbu karang semakin meningkat pula yang merusak karena kebutuhan ekonomi masyarakat yang hanya bergantung pada penghasilan yang didapatkan dari laut, kalau saya liat-liat masyarakat disini berpendapat bahwa kalau kita menangkap ikan dengan cara merusak pasti terumbu karang tersebut akan ditangani oleh pihak yang berkewajiban sehingga untuk mengelola terumbu karang agar menjadi bermanfaat perlu pertimbangan bagi kami khususnya kami membutuhkan ketegasan pihak kepolisian dalam mengani penangkapan ikan secara illegal” (hasil wawancara dengan Ibu YN pada tanggal 26 februari 2017).

Wawancara diatas menegaskan bahwa sebenarnya Pemerintah sudah berusaha untuk menangani kerusakan terumbu karang agar bisa dimanfaatkan baik itu untuk pemanfaatan agar wisatawan tertarik terhadap keindahan bawah laut ataupun untuk kelangsungan hidup para nelayan. Kita juga harus selalu berharap dari pemerintah tapi perlu adanya kesadaran untuk diri kita masing-masing dalam menjaga kelstarian terumbu karang.

Sebagai warga Indonesia kita wajib melestarikan kekayaan alam yang ada di negara kita. Salah satunya adalah kekayaan alam yang ada di laut yaitu

Terumbu karang. Kita harus bisa mengupayakan bagaimana caranya agar budi daya terumbu karang bisa kita kembangkan karena mempunyai banyak manfaat dan keuntungan. Salah satunya sebagai laboratorium alam untuk penunjang pendidikan dan penelitian. Penelitian akan menghasilkan informasi penting dan akurat sebagai dasar pengelolaan yang lebih baik. Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa masi perlu adanya pengelolaan terumbu karang yang lebih untuk pemanfaatannya, selain karena kerusakannya yang meningkat dilihat dari segi pengelolaan juga masi kurang

D. Kondisi SDM (Sumber Daya Manusia)

Problem yang ada dalam dalam SDM diantaranya yaitu kurangnya jumlah personil, kurangnya kompetensi personil, kesalahan penempatan personil lemahnya kemampuan pengembangan mereka dan termasuk rendahnya keinginan personil untuk berkembang inilah yang terkadang menjadi kendala dalam pengimplementasian pengelolaan terumbu karang. Perencanaan dalam SDM digunakan untuk menentukan dan identifikasi SDM dengan keahlian yang diisyaratkan untuk kesuksesan dalam mengimplementasikan pengelolaan terumbu karang.

Hasil wawancara dengan salah satu personil jagawana yaitu bagian pengelolaan dan tranplantasi terumbu karang di balai taman nasional taka bonerate wilayah dua jinato mengatakan bahawa

“kami dari pihak kepolisian selalu melakukan kerja sama dengan berbagi instansi yang terkait dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kegiata-kegiatan yang melanggar aturan hukum tentang cara menangkap

ikan yaitu mengadakan penyuluhan tentang dampak beserta sanksi hukum dari kegiatan merusak terumbu karang atau penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan bius di tiap-tiap desa yang ada di dalam Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate, namun kami masih kekurangan SDM walaupun ada mereka terkadang tidak tau posisi dan tempatnya masing-masing sehingga kami dari pihak pengelola mengalami kesulitan jadi saya Cuma berharap agar pengetahuan terhadap SDM ditingkatkan ” (wawancara dengan Bapak AM, pada tanggal 26 februari 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan terumbu karang terkadang terkendala oleh SDM itu sendiri karena kurangnya perhatian dan kinerja mereka sehingga hanya sebagian yang bersusah paya dalam mengelola terumbu karang

Berdasarkan hasil Wawancara dengan salah satu masyarakat yang sekaligus seorang guru muatan lokal dikediamannya .

“... menurut pengetahuan saya SDM dalam pengimplementasian pengelolaan terumbu karang masi kurang tapi memang ada tapi tidak banyak dari mereka yang peduli sehingga sangat sulit untuk mengelola terumbu karang tersebut apalagi memang sangat sulit untuk mencegah terjadinya penangkaan ikan secara *illegal* di dalam kawasan taman nasional karena alasan yang utama pelaku itu adalah faktor kehidupan yang memaksa para pelaku terus melakukan aksinya kemudian kegiatan menangkap ikan dengan menggunakan bom atau bius yaitu untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak dan kemudian sangat praktis untuk dilakukan inilah yang menjadi faktor penghambat terbesar dalam pengelolaan terumbu karang menurut saya”(wawancara dengan Bapak DL, pada tanggal 26 februari 2017).

Dari hasil wawancara tersebut dapat di ketahui bahwa kondisi sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pengimplementasian terumbu karang masi tergolong sangat kurang sehingga perlunya perhatian lebih dari pemerintah dalam mengarahkan tenaga-tenaga kerjanya dalam pengelolaan dan pengimplementasian terumbu karang. Karena salah satu kendala terbesar dalam pengelolaan terumbu

karang adalah semakin meningkatnya yang merusak dan kurangnya sumber daya manusianya nelayan yang melakukan penangkapan ikan secara illegal di sebabkan untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak dan dianggap sebagai cara yang praktis di lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup Hal tersebut juga telah diperkuat oleh fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa kemiskinan nelayan masih menjadi fenomena dan karena kemiskinan tersebut itu pula sehingga pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan yang tidak terkendali dan akhir pada kerusakan ekosistem dalam menopang kehidupan. Pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan laut yang kurang memperhatikan aspek kelestarian dan keberlanjutannya akan memberi efek negative dalam banyak hal. Hasil penelitian menunjukan bahwa kondisi sumber daya manusia dalam pengelolaan terumbu karang masi terbilang belum efektif dilihat dari kurangnya jumlah personil, kurangnya kompetensi personil, kesalahan penempatan personil, lemahnya kemampuan pengembangan dan termasuk rendahnya keinginan personil untuk berkembang inilah yang terkadang menjadi kendala dalam pengimplementasian kebijakan pengelolaan terumbu karang.

E. Rehabilitas Keadaan Terumbu Karang

Penyebab terjadinya kerusakan terumbu karang diantaranya disebabkan oleh ulah manusia dan pemanasan global yang menyebabkan pemutihan karang dan masih banyak pengalihan fungsi terumbu karang yang hanya untuk peningkatan ekonomi pribadi dan sifatnya tidak konservatif. Dalam memulihkan kondisi terumbu karang dibutuhkan waktu yang sangat lama namun saat ini telah dikenal banyak metode salah satunya adalah metode transplantasi karang.

Teknik atau cara dalam merehabilitasi Terumbu karang adalah melakukan transplantasi terumbu karang . tranplantasi terumbu karang merupakan salah satu upaya rehabilitasi yang paling efektif , tercatat hampir seluruh dinas perikanan kota maupun provinsi di indonesia yang memiliki kawasan terumbu karang dan mulai rusak mempunyai program rehabilitas karang melalui teknik transplantasi karang, seiring dengan berjalannya kegiatan ini di lapangan telah muncul beberapa persepsi yang cenderung salah kaprah mengenai teknik transplantasi terumbu karang tersebut , program rehabilitasi yang tidak didukung dengan sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan terumbu karang membuat program rehabilitasi ini diartikan sebagai salah satu cara yang paling efektif untuk merehabilitasi karang

Teknik transplantasi ini mulai populer dan muncul persepsi dikalangan masyarakat bahwa jika terumbu karang mulai rusak maka saatnya dilakukan transplantasi karang. Beberapa kasus terjadi ketika para nelayan sadar bahwa tangkapan ikan karangnya mulai menurun dan mereka sadar bahwa transplantasi kiarang dapat mengembalikan stok ikan karang dengan cepat sehingga disisi lain praktik perikanan yang tidak lestari masi terus berlangsung. Padahal kegiatan tersebut faktor utama yang merusak terumbu karang sehingga stok ikan karangpun menurun. Sehingga usaha-usaha perlindungan kawasan menjadi pilihan yang tidsk populer dan menurut mereka cenderung merugikan karena adanya pembatasan penangkapan ikan karang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf dinas perikanan dan kelautan di balai dua desa jinato mengatakan bahwa

“ untuk rehabilitasi keadaan terumbu karang mungkin perlu puluhan-puluh tahun untuk memulihkannya akan tetapi perlu adanya usaha untuk memulihkannya sejak dini yaitu salah satunya adalah tranplantasi terumbu karang, kami kemarin sudah mencoba melakukannya dengan cara mencakokkannya dan alhamdulillah hasilnya lumayan baik kami berencana untuk melakukan sosialisai tentang rehabilitasi keadaan terumbu karang, akan tetapi kalau saran saya kalau memang tidak bisa mengatasi kerusakan terumbu karang sebaiknya jangan merusak itu saran saya kepada masyarakat setempat”.(Hasil wawancara dengan Ibu YN.tanggal 26 februari 2017)

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk rehabilitasi terumbu karang butuh waktu yang lumayan lama namun perlu diatasi sejak dini agar kelestariannya tetap terjaga dan kerusakannya tidak meningkat. Inilah salah satu upaya dalam penyelamatan ekosistem terumbu karang walaupun dalam perjalanannya sudah banyak dikembangkan dengan teknik lain dan dengan berbagai tujuan pula.

Banyak program rehabilitasi ekosistem terumbu karang terbukti tidak efektif dalam atau layak dalam skala besar, baik secara ekonomis maupun ekologis karena tidak masuk akal bila rehabilitasi yang mahal dilakukan pada saat faktor kerusakan tetap terjadi. Selanjutnya proses alamiah mungkin sudah terjadi karena dalam banyak kasus proses alamiah lebih baik dari pada penyembuhan yang mahal. Program konservasi dengan melibatkan peran serta masyarakat pesisir untuk menjaga dan mengelola ekosistem terumbu karang jauh lebih baik dibandingkan dengan memperbaiki. Rehabilitasi terumbu karang berjalan cukup baik dan cukup menfokuskan untuk kelestarian terumbu karang meski belum efektif tapi sudah dilakukan secara perlahan.

F. Pengawasan Sumber Daya Terumbu Karang

Sistem pengawasan merupakan bagian integral dari pengelolaan terumbu karang, pengawasan adalah setiap upaya dan atau tindakan yang bertujuan terciptanya tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan pengelolaan terumbu karang. Sistem pengawasan terumbu karang terdiri dari sistem pengawasan berbasis masyarakat dan kelompok masyarakat pengawas. Sistem pengawasan berbasis masyarakat adalah sistem pengawasan yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan terumbu karang. Adapun pengawasan yang dilakukan yaitu

1. *Monitoring* yaitu kegiatan pengamatan, pengumpulan dan analisis data untuk menilai tingkat pemanfaatan dan kelimpahan sumber daya terumbu karang termasuk tingkat pelanggaran dalam pemanfaatan terumbu karang
2. *Control* yaitu mekanisme pengaturan atau pengendalian antara lain mencakup penyusunan, perundang-undangan, perizinan, pembatasan alat tangkap maupun zonasi penangkapan.
3. *Surveliance* yaitu kegiatan operasional dalam rangka menjamin ditaatinya peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan terumbu karang.

Sistem pengawasan berbasis masyarakat memiliki tujuan dan sasaran yaitu meningkatnya pengawasan oleh masyarakat dan menurunnya tingkat pelanggaran dalam pemanfaatan terumbu karang. Menguatnya kelembagaan pengawasan di daerah terciptanya pengawasan mandiri dan terjalinnya koordinasi

pengawasan secara terpadu serta lestariannya terumbu karang dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Kelompok masyarakat pengawas memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu menyebar luaskan informasi kepada masyarakat tentang fungsi, gangguan, ancaman dan kelestarian terumbu karang

Wawancara dengan kepala sub bagian didinas perikanan dan kelautan dikantor wilayah desa jinato mengatakan bahwa

“ kami sedang menyusun rencana untuk sistem pengawasan dalam hal pengelolaan terumbu agar pemanfaatannya dapat dimanfaatkan dengan baik dan tidak disalahgunakan yang dapat merusak terumbu karang. Kami mencoba menurunkan tenaga lebih untuk pengawasan pengelolaan terumbu karang dan mengarahkan mereka untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran kepada aparat pengawas, kelompok pengawasan berperan aktif dalam penyusunan rencana operasional pengelolaan terumbu karang” (wawancara dengan Ibu MS tanggal 20 februari 2017)

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan sumber daya terumbu karang berjalan lumayan baik ketika ada perintah langsung dari atasan dan melaksanakan operasional pengawasan terumbu karang baik sendiri maupun bersama aparat hukum apa bila ada dugaan kuat terjadinya pelanggaran dapat dilakukan penyelidikan lanjutan dan penyidikan untuk diproses secara hukum.

Wawancara dengan salah satu staf pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan di kediamannya dibalai jagawanam mengatakan bahwa

“ kami biasa dapat perintah untuk mengawasi orang-orang yang menangkap ikan secara illegal karena dapat merusak terumbu karang. Dan kalau yang melanggar kami melaporkan kepada atasan untuk diproses secara hukum, tapi orang yang melanggar aturan bukannya berkurang karena sering ditangkap malah semakin bertambah kalau menurut saya ini adalah kendala yang susah dalam penangangan pengelolaan terumbu karang, saya pikir

ketegasan penegak hukum untu pelanggar perlu ditingkatakan” (wawancara dengan Bapak DL, tanggal 19 february 2017 .)

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun pengawasan ketat dilakukan kenyataanya masih banyak yang melanggar dan solusi untuk hal ini yaitu perlunya ketegasan lebih dari pengak hukum untuk yang melanggar dan merusak kelestarian terumbu karang. Meningkatkan penegakan hukum dibidang kelautan dan perikanan dapat menjadi kepuasana tersendiri dalam pengelolaan terumbu karang dan menjaga kelestarian di tempat wisata tersebut.

G. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Terumbu Karang

1. Faktor pendukung

Peraturan daerah tentang pengelolaan terumbu karang ini di berlakukan di kawasan terdapatnya terumbu karang yang merupakan wilayah laut kewenangan pengelolaan Kabupaten kepulauan selayar serta dibentuknya tim koordinasi yang ditetapkan dengan keputusan bupati yang berperan serta dalam perumusan kebijakan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan usaha atau kegiatan lainya yang berkaitan dengan pemanfaatan terumbu karang . Adapun yang menjadi pertimbangan dalam pengelolaan terumbu karang yaitu

- a. Adanya kesadaran dari pemerintah bahwa kawasan terumbu karang memiliki keanekaragaman sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang berpotensi ekonomi, yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat nelayan terumbu karang perlu dikendalikan secara bijaksana sehingga tercipta keseimbangan antara

pemanfaatan dan perlindungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan serta pengelolaan terumbu karang berupa pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian sumberdaya ekosistemnya, perlu dilakukan secara serasi, selaras dan seimbang dengan memberdayakan masyarakat.

- 
- b. Meningkatnya penanganan terhadap pengelolaan terumbu karang pengawasan atau pengendalian diselenggarakan untuk menjamin pengelolaan terumbu karang secara terpadu dan berkelanjutan, pemantauan, pengamatan lapangan atau evaluasi dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya terumbu karang, masyarakat dapat berperan serta dalam proses pemantauan, pengamatan lapangan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan terumbu karang.
- c. Masyarakat taat aturan dalam hal ini yang dimaksud adalah sebagian masyarakat mulai sadar akan pentingnya kelestarian lingkungan, mereka mulai melakukan arahan-arahan yang disampaikan oleh pemerintah seperti melakukan pengawasan yang dilakukan melalui penyampaian laporan atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Pengelolaan terumbu karang juga dilakukan secara kolaboratif antara masyarakat dan pemerintah pengelolaan ini disebut pengelolaan berbasis masyarakat pemerintah setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan pihak-pihak terkait yang ada dalam masyarakat yang bekerja sama dalam mengelola kawasan terumbu karang yang sudah ditetapkan/disepakati bersama.

Tujuan dari pengelolaan terumbu karang berbasis-masyarakat adalah untuk menjaga dan melindungi kawasan ekosistem atau habitat terumbu karang supaya keanekaragaman hayati dari kawasan ekosistem atau habitat tersebut dapat dijaga dan dipelihara kelestariannya dari kegiatan-kegiatan pengambilan atau perusakan. Selain itu, lewat pengelolaan terumbu karang berbasis-masyarakat maka produksi perikanan di sekitar lokasi terumbu karang yang dikelola/dilindungi dapat terjamin dan dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitarnya. Terumbu karang yang dilindungi oleh masyarakat dapat juga dikembangkan sebagai lokasi pendidikan dan penelitian keanekaragaman hayati ekosistem dan habitat bagi institusi pendidikan (SD, SMP, SMU, Universitas, dll.) serta dikembangkan sebagai lokasi pariwisata ramah lingkungan (ekowisata) yang dapat memberikan kesempatan usaha wisata berbasis-masyarakat.

Pengelolaan terumbu karang berbasis-masyarakat juga memberikan legitimasi dan pengakuan terhadap hak dan kewajiban masyarakat dalam mengelola terumbu karang dan sumberdaya pesisir dan laut yang ada di sekitar mereka. Supaya masyarakat dapat mengetahui secara langsung bagaimana keadaan terumbu karang yang ada di daerahnya maka mereka perlu dilatih untuk melakukan pemantauan sendiri. Setelah mereka mengetahui kondisi terumbu karang yang ada maka diharapkan akan timbul kepedulian mereka yang lebih tinggi untuk menjaga kelestariannya. Masyarakat dapat mengambil langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan guna menjaga dan mengelola terumbu karang yang ada apabila mereka dibekali dengan suatu pengetahuan. Masyarakat dapat melakukan pemantauan dan membangun data dasar tentang kondisi terumbu

karang yang ada di wilayahnya apabila mereka memiliki keterampilan untuk melakukan pemantauan. Mereka dapat mengetahui dari waktu ke waktu apakah kondisi terumbu karang mereka lebih baik atau lebih buruk. Masyarakat dapat mengetahui kondisi umum terumbu karang yang ada baik persen tutupan karangnya maupun kelimpahan ikannya. Masyarakat juga dapat melakukan pemantauan sendiri terhadap hal-hal apa saja yang dapat mengancam kelestarian terumbu karang, baik yang terjadi secara alami seperti bintang laut berduri dan pemutihan karang maupun akibat perbuatan manusia seperti penggunaan bom dan racun sianida.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu anggota lembaga swadaya masyarakat kelompok Transplantasi Karang di Desa Jinato di Gedung Assedingenne atau Balai Pertemuan Masyarakat Desa Jinato.

“ Saya pribadi merasa bangga dengan adanya lembaga ini yang didirikan oleh coremap sebagai program untuk pemberdayaan masyarakat sehingga kami dari masyarakat merasa sangat turut serta dalam menjaga kelestarian laut, karena adanya lembaga transplantasi ini yang bertujuan untuk melakukan pengelolaan terhadap karang-karang dengan cara pembibitan dan penyambungan sehingga laut akan memiliki potensi sumber daya ikan yang melimpah”.(hasil wawancara dengan Bapak AW ,tanggal 11 Maret 2017).

Hasil wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya lembaga yang didirikan oleh coremap seperti halnya lembaga transplantasi karang sangat membantu dalam pelestarian sumberdaya alam kemudian dengan adanya lembaga ini masyarakat merasa secara langsung ikut serta dalam pengelolaan lingkungan hidup yang mana dimaksud Transplantasi karang yaitu dilakukan dengan mengambil karang induk dan membelahnya menjadi beberapa potongan

karang berukuran 5-7 centimeter. Potongan karang itu direkatkan pada media substrat menggunakan lem. Selanjutnya dilakukan wawancara dengan salah satu anggota sanggar kreatif lantigian yang merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Desa Jinato.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan di ruangan Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Selayar



“ untuk menanggulangi kegiatan penangkapan ikan secara illegal, kami dari pemerintah tidak hanya memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat nelayan yang berupa barang dan yang lainnya akan tetapi kami juga memberikan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan memancing Ikan cakalang dan pelatihan membuat agar para masyarakat nelayan mendapatkan solusi atau alternatif untuk menambah penghasilan saat mereka tidak turun melaut.” (wawancara dengan Ibu M S,20 maret 2017).

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan dalam memberdayakan masyarakat nelayan tidak hanya dengan memberikan bantuan-bantuan berupa barang seperti jaring, rumpon bambu dan keramba apung serta pengadaan berbagai kelompok-kelompok usaha bagi nelayan akan tetapi pemerintah juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat nelayan, dapat kita simpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat telah memberikan dampak positif terhadap masyarakat nelayan yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Taka Bonerate khususnya di Desa Jinato yang mana dengan adanya bantuan dari pihak pemerintah tentang penyediaan lapangan kerja seperti pengadaan sanggar kreatif yang di bentuk dapat menjadi solusi bagi

masyarakat dalam mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

2. Faktor penghambat

A. Perilaku hubungan organisasi meliputi komitmen dan koordinasi

Kelompok pengelola yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola dan menjaga kelestarian terumbu karang tampak hanya sebagian yang peduli, dilihat dari perilaku para pengelola khususnya pihak jagawana dimana hanya sebagian diantara mereka yang memperhatikan orang-orang yang merusak terumbu karang dan melaporkan kepada atasan sedangkan sisanya tampak terlihat tidak peduli dan hanya menyandang status formalitas. dengan tingkat komitmen yang tinggi dari instansi kebijakan ini tetap dapat diimplementasikan walaupun dalam implementasi koordinasi yang dibangun masih belum maksimal akibatnya implementasi kebijakan pengelolaan terumbu karang belum maksimal pula. Padahal seharusnya dalam mengatasi sesuatu perlu adanya hubungan yang baik antara instansi yang terkait yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi yang baik diperlukan untuk keberhasilan kebijakan tersebut agar dapat direalisasikan dengan baik.

B. Perilaku implementor tingkat bawah

Tingkat profesionalisme staf dalam pengelolaan terumbu karang masih kurang baik dari segi jumlah maupun pelaksana. walaupun kontrol organisasi tetap dilakukan akan tetapi staf yang profesional sangat dibutuhkan yang dapat melakukan tugas dengan baik demi menjamin kelestarian terumbu karang di

tempat wisata tersebut . Kerjasama antara lembaga pemda, universitas, pengguna, dan semua pihak yang terkait adalah langkah awal yang perlu segera diimplementasikan untuk menyatukan persepsi, visi, dan mencari jalan keluar terbaik bagi semua pihak terutama untuk ekosistem terumbu karang itu sendiri yang saat ini mungkin sedang menangis, merintih mananti langkah konkrit dari kita semua.

C. Perilaku menyimpang kelompok masyarakat

Paham dan respon masyarakat yang tampak bingung mengenai isi kebijakan yang salah mengartikan isi kebijakan tersebut .sehingga perlu sekali isi kebijakan ini disosialisasikan kepada masyarakat. Mengingat kondisi terumbu karang kita di Indonesia, termasuk di Sulsel sudah sangat banyak mengalami kerusakan, maka harus dilakukan upaya yang lebih proaktif oleh lembaga yang berwenang untuk menghindari hancurnya sumberdaya alam yang sangat berharga ini. Terumbu karang yang rusak membutuhkan waktu yang sangat lama untuk kembali normal secara alami , itupun jika sumber kerusakannya telah dihentikan. Oleh karena itu, upaya-upaya perbaikan ekosistem dengan bantuan manusia seperti rehabilitasi ekosistem terumbu karang juga perlu mendapat perhatian. Namun demikian upaya-upaya rehabilitasi ini tidak akan ada manfaatnya jika kita belum mampu menerapkan aturan-aturan yang berhubungan dengan manajemen ekosistem terumbu karang.

Dewasa ini jumlah kerusakan terumbu karang menurun drastis di Dunia khususnya di Indonesia. Kerusakan terumbu karang bisa terjadi karena faktor

alam atau karena manusia itu sendiri,berikut beberapa faktor yang mnyebabkan kerusakan Terumbu Karang yaitu :

1. Terumbu karang yang hidup di dasar laut merupakan sebuah pemandangan yang cukup indah. Banyak wisatawan melakukan penyelaman hanya untuk melihatnya. Sayangnya, tidak sedikit dari mereka menyentuh bahkan membawa pulang terumbu karang tersebut. Padahal, satu sentuhan saja dapat membunuh terumbu karang.
2. Membuang sampah ke laut dan pantai yang dapat mencemari air laut mungkin tidak banyak yang sadar, penggunaan pupuk dan pestisida buatan pada lahan pertanian turut merusak terumbu karang di lautan. Karena meskipun jarak pertanian dan bibir pantai sangat jauh, residu kimia dari pupuk dan pestisida buatan pada akhirnya akan terbang ke laut melalui air hujan yang jatuh di lahan pertanian
3. Terumbu karang merupakan tujuan wisata yang sangat diminati. Kapal akan lalu lintas di perairan. Membuang jangkar pada pesisir pantai secara tidak sengaja akan merusak terumbu karang yang berada di bawahnya.
4. Masih banyak yang menangkap ikan di laut dengan menggunakan bom dan racun sianida. Ini sangat mematikan terumbu karang .

Selain karena kegiatan manusia, kerusakan terumbu karang juga berasal dari sesama makhluk hidup di laut. Siput drupella salah satu predator bagi terumbu karang. Pengundulan hutan di lahan atas sedimen hasil erosi dapat mencapai terumbu karang di sekitar muara sungai, sehingga mengakibatkan kekeruhan yang menghambat difusi oksigen ke dalam polip atau hewan

karang. Pengerukan di sekitar terumbu karang Meningkatkan kekeruhan yang mengganggu pertumbuhan karang penangkapan ikan hias dengan menggunakan bahan beracun (misalnya Kalium Sianida) Mengakibatkan ikan pingsan, mematikan karang dan biota avertebrata. Penangkapan ikan dengan bahan peledak Mematikan ikan tanpa dikriminasi, karang dan biota avertebrata yang tidak bercangkang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang Nelayan bahwa yang merusak terumbu karang adalah orang-orang yang tinggal di daerah itu sendiri

“saya kalau mau keluar pagi-pagi mau pergi cari ikan saya sering melihat ibu-ibu membuang sampah kelaut meskipun bapak kepala desa sering bilang untuk tidak membuang sampah kelaut karena akan merusak terumbu karang mereka tidak mendengarkan dan tetap membuangnya dan kalau saya pulang pada malam hari saya sering mendengar suara seperti orang yang membom ikan itulah yang sangat merusak terumbu karang menurut saya. (hasil wawancara dengan Pak AGP, tanggal 01 maret 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Jinato di kantor desa mengatakan bahwa

“biasanya banyak pengunjung yang datang berwisata tapi karena terumbu karang sudah banyak yang rusak mereka sudah mulai mempertimbangkan untuk datang kembali dan memilih pulau lain dari pada kepulauan ini, banyak anak-anak kalau air sudah mulai surut mereka turun kelaut dan menginjak-injak karang saya sudah tanya sama orang tuanya untuk tidak menyuruh anaknya turun kelaut tapi hanya sebagian orang tua yang menegur anaknya tapi kami sudah berusaha memberi pengajaran kepada anak-anak tentang perlunya kesadar dalam pengelolaan terumbu karang”. (hasil wawancara dengan Bapak ABD, tanggal 01 maret 2017)

Sedangkan menurut pihak jagawana yaitu polisi yang mengawasi keadaan disekitar laut bahwa kebanyakan yang merusak terumbu karang karena

penangkapan ikan dengan cara merusak. Dengan banyaknya penangkapan ikan dengan cara merusak, terumbu karang yang kondisinya menurun akan kehilangan nilai karena menjadi kurang produktif. Suatu terumbu karang yang sehat dapat menghasilkan hasil perikanan rata-rata 20 ton per tahun. Hasil suatu terumbu karang yang rusak akibat penangkapan ikan secara ilegal hanya 5 ton per tahun. Meskipun hanya sebagian yang rusak, terumbu karang tidak dapat pulih ke tingkat produktivitas tinggi. Terumbu karang yang telah dibom hanya memberikan keuntungan kecil sementara bagi pengebom ikan, namun memberikan kerugian besar yang berjangka panjang bagi masyarakat Indonesia, bahkan pengunjung atau wisatawan yang awalnya sangat tertarik dengan pulau ini karena keindahan terumbu karangnya mulai menurun drastis pada tahun-tahun berikutnya padahal masyarakat dipulau itu juga mendapat keuntungan jika banyak wisatawan yang datang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syamsuddin salah satu tokoh masyarakat atau nelayan di Desa Jinato yang ada di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate

“sebenarnya kami tau kalau tindakan menangkap ikan dengan menggunakan bom atau bius itu memiliki resiko yang berbahaya bagi kehidupan serta dapat merusak karang-karang yang ada dilaut dan itu dilarang oleh pemerintah akan tetapi kami melakukan hal itu hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari dan itupun kami sudah lakukan dari dulu sebelum kawasan ini masuk sebagai kawasan taman nasional.” (hasil wawancara dengan Bapak SM, tanggal 03 maret)

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa masyarakat pelaku yang menangkap ikan dengan cara merusak sebenarnya

mengetahui dampak dan resiko dari perbuatan mereka bahwa kegiatan tersebut dapat merusak kelestarian lingkungan hidup akan tetapi alasan mereka karena faktor kehidupan dan sudah mereka lakukan sejak dari dulu. Selanjutnya hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat di Desa yang ada di

Banyak ilmuwan melihat bahwa penyebab utama kerusakan terumbu karang adalah manusia (*anthropogenic impact*), misalnya melalui kegiatan tangkap lebih (*over-exploitation*) terhadap hasil laut, penggunaan teknologi yang merusak (seperti *potassium cyanide*, bom ikan, dan lain-lain), erosi, polusi industri dan mismanajemen dari kegiatan pertambangan telah merusak terumbu karang baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber terbesar dari kematian terumbu karang adalah kerusakan mekanik oleh badai tropik yang hebat. Topan atau angin puyuh yang kuat ketika melalui suatu daerah terumbu sering merusak daerah yang luas di terumbu. Bila terumbu karang banyak yang terletak di zona yang sering dilalui oleh topan atau angin puyuh, maka seluruh atau sebagian dari terumbu akan dirusak atau mengalami kerusakan berat yang besar.

Terumbu karang Indonesia adalah suatu dasar bagi struktur ekonomi dan sosial di kawasan ini, namun keadaannya dalam kondisi sangat terancam. Untuk mengelola terumbu karang dibutuhkan implementasi rencana pengelolaan yang menggabungkan koleksi data dasar status terumbu karang, hasil pemantauan yang terus menerus, strategi implementasi, dan pengelolaan yang adaptif. Karena setiap lokasi berbeda, maka strategi yang berskala luas mungkin saja dibutuhkan untuk mengelola sumberdaya secara lebih baik. Pengelolaan yang efektif akan membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas serta dukungan pendanaan.

Karena banyak tekanan pada terumbu karang yang berakar dari masalah sosial dan ekonomi, pengelolaan juga harus melihat aspek lain. Upaya yang perlu ditekankan adalah pengentasan kemiskinan, mata pencaharian alternatif, perbaikan pemerintahan, dan peningkatan kepedulian masyarakat akan nilai terumbu karang dan perikanan serta ancaman yang dihadapi keduanya. Bila diinformasikan dengan baik dan didanai secara tepat, pemerintah setempat, LSM, tetua desa, dan segmen-segmen kunci industri wisata, dapat menjadi pemelihara sumberdaya pesisir yang sukses.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan terumbu karang masi belum sepenuhnya berhasil menunjukkan perubahan sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap kelesatrian terumbu karang yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat nelayan. Pengelolaan ekosistem terumbu karang pada hakekatnya adalah suatu proses pengontrolan tindakan manusia, agar pemanfaatan sumberdaya alam dapat dilakukan secara bijaksana dengan mengindahkan kaidah kelestarian lingkungan. Apabila dilihat permasalahan pemanfaatan sumberdaya ekosistem terumbu karang yang menyangkut berbagai sektor, maka pengelolaan sumberdaya terumbu karang tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, namun harus dilakukan secara terpadu oleh beberapainstansiterkait
2. Kerusakan terumbu karang banyak terjadi karena faktor dari manusia itu sendiri ataupun disebabkan karena faktor alam misalnya membuang sampah kelaut dan menangkap ikan dengan cara merusak. Pemerintah melakukan sosialisasi kemasyarakat tentang pentingnya menjaga keindahan bawah laut yang menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat Suatu pengelolaan yang baik adalah yang

memikirkan generasi mendatang untuk dapat juga menikmati sumberdaya yang sekarang ada. melestarikan, melindungi, mengembangkan, memperbaiki dan meningkatkan kondisi atau kualitas terumbu karang dan sumberdaya yang terkandung di dalamnya bagi kepentingan seluruh lapisan masyarakat serta memikirkan generasi mendatang.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka dikemukakan beberapa saran:

1. Kesadaran masyarakat untuk mencintai bahari perlu dibangun. Kerugian perekonomian akibat aktifitas kerusakan terumbu karang perlu dipublikasikan secara luas melalui berbagai media kepada masyarakat, guna membangkitkan kepedulian dan kecintaan rakyat kepada daerah atau negaranya sebagai negeri bahari.
2. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar harus berupaya untuk mengidealkan ketersediaan sarana dan prasana dalam rangka optimalisasi pengelolaan terumbu karang di Taman Nasional Taka Bonerate.
3. Perlu adanya peningkatan wawasan dan integritas para penegak hukum agar tidak salah dalam menerapkan hukum dan dapat menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Yakni dengan proses rekrutmen Para Penegak hukum yang yang berdasarkan prinsip-prinsip transparan, partisipatif dan akuntabel secara professional.

4. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan instansi terkait harus mempertimbangkan Mata Pencaharian Alternatif (MPA) bagi masyarakat agar pelarangan kompressor memberikan hasil positif dan tidak mengabaikan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abiding ,S.Z.2002.*Kebijakan Publik*.Jakarta,Yayasan Pancur Siwan.
- Anonim. 2010. Meneropong Peluang Investasi Bisnis Kepulauan Selayar.melalui
([http//http://www.anakkukang.wordpress.com](http://http://www.anakkukang.wordpress.com))
- Anonim. 2009. Takabonerate 3 taman laut terindah.
([http//http://www.backpackingindonesia.com](http://http://www.backpackingindonesia.com))
- Anonim. 2008. Potensi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Kab. Selayar
([http//http://www.selayaronline.com](http://http://www.selayaronline.com))
- Anonim. 2006. Memaksimalkan Potensi Wilayah Pesisir (coremap)
- Arialuet,2011.Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang.Jakarta. Gramedia
- Arialuet,2011.Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang. Melalui
[https://www.google.com/search?q=Pengelolaan+ekosistem+terumbu+karang«Arielaut's
Blog.htm](https://www.google.com/search?q=Pengelolaan+ekosistem+terumbu+karang«Arielaut's+Blog.htm)
- Dahuri, dkk. 2001. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu.
Pradnya Paramita. Jakarta
- Danusaputro. 1984. Hukum Dan Lingkungan. Bandung. Bina Cipta
- Dinas Kelautan & Perikanan (DKP) – Suharsono, dkk. 1995. *Wisata Bahari Kepulauan
Takabonerate dan Kepulauan Lucipara*
- Dye, Thomas R.1992. *Under study public policy*. USA Preci hall INC
- Mujiyanto,2013,Makalah Terumbu Karang .Melalui
http://id.wilkpedia.org/wiki/terumbu_karang.html. (diakses 9 september)
- Howlett, 1995. *Studiying Publick policy and policy sub system*. Oxford Uneversity Press
- Howlett, Dkk 2005. *Studiying public Policy*, Torento: Oxford Uversity Press

- Toni,AM, 2013, Taman Nasional Taka Bonerate. Diakses melalui <https://www.google.com/search?q=taman+nasional+taka+bonerte&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b> (diakses pada 10 oktober 2016)
- Purwanto,Erwan Agus.,2012.*Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya*,Yogyakarta: Gava Media
- Purwadarminta. 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi). Cetakan Ke I. Surabaya. Pt. Balai Pustaka.
- Ratna,P, 2013,Makalah Ekosistem Terumbu Karang. Melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Makalah_Ekosistem_Terumbu_Karang,diakses pada 10 oktober
- Raharjo, S. 1982. Ilmu Hukum. Bandung. Alumni.
- Rahmat, Nur. 2013. Taman Nasional Taka Boneate. Kementrian Kehutanan
- Raduan. 2006. Buletin Koservasi Taman Nasional Taka Bonerate. Benteng Selayar. Kima (Kilas Informai Taman Nasional Taka Bonerate)
- Reksodiharjo, dkk.1999 .Buku Panduan Pendidikan konservasi Terumbu Karang.
- Sugiyono,2014.*Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung:Alfabeta.
- Supramono, G. 2011. Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana Di Bidang Perikanan. Jakarta. Rineka Cipta.
- Tohirin ,1998.*Metode Penelitian Kualitatif*,Jakarta,Raja Grafindo Persada.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi kedua. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta. Madpress
- Wisadirana,D.2005,*Metode Penelitian Kualitatif dan Pedoman Pedoman Penulisan Skripsi untuk Ilmu Sosial*, Malang: UMM.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010,melalui http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_KEPSELAYAR_8_2010.pdf (diakses pada tanggal 14 oktober 2016)





pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang



Terumbu karang yang tidak rusak dan yang mengalami kerusakan

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama lengkap Masita Sunarni, disapa ita. Lahir pada tanggal,09 juni 1995 Kampung Tangnga, Kabupaten kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Anak pertama dari pasangan Suami istri Muh. Nasir dan Sitti Sulaeha, penulis menempuh pendidikan pertama selama enam tahun di SDN Impres Kampung Tangnga Kecamatan Pasi'masunggu Kabupaten Kepulauan Selayar dan selesai pada tahun 2006. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTS) Ujung Jampea Kecamatan Pasi'masunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan dan selesai pada tahun 2009, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan kesekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Pasi'masunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan dan selesai pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dengan Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Penulis sangat bersyukur, karenatelah diberikan kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamankan dan memberikan manfaat.